

**KONFLIK KEKUASAAN ANTARA KETURUNAN KESULTANAN
PALEMBANG DARUSSALAM PADA MASA 2003-2006**



SKRIPSI

**Diajukan
untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
dalam program studi Politik Islam**

Oleh :

ARIS IKBAL HAIRULLAH

NIM. 1544300006

**JURUSAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2017**

**KONFLIK KEKUASAAN ANTARA KETURUNAN KESULTANAN
PALEMBANG DARUSSALAM PADA MASA 2003-2006**



SKRIPSI

**Diajukan
untuk memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
dalam program studi Politik Islam**

Oleh :

ARIS IKBAL HAIRULLAH

NIM. 1544300006

**JURUSAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2017**

SKRIPSI


**Konflik Kekusaan Antara Keturunan Kesultanan
Palembang Darussalam Pada Masa 2003-2006**

disusun dan diperstapkan oleh :
ARIS IKBAL HAIRULLAH
NIM, 1544300006

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 22 November 2017

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

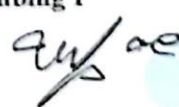
Ketua Dewan Penguji


Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag
NIP. 19711124 200312 1 001


Sekretaris


Kiki Mikail, M.Sc

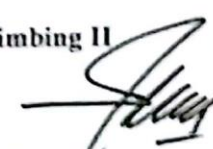
Pembimbing I


Dr. Nyimas Umi Kalsum, M.Hum
NIP. 19750715 200710 2 003

Penguji I


Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag
NIP. 19711124 200312 1 001

Pembimbing II


Sholeh Khudih, M.Hum
NIP. 19741025 200312 1 003

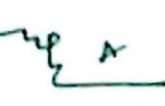
Penguji II


Kiki Mikail, M.Sc


Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Politik Islam (S.Sos)
Tanggal, 22 November 2017

Dekan
Fakultas Adab dan Humaniora




Huda, M. Ag, M.A
NIP. 19701114 200003 1 002

Ketua Program Studi
Politik Islam


Dr. Mohammad Syawaluddin, M.Ag
NIP. 19711124 200312 1 001

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Aris Ikbal Hairullah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

**“Konflik Kekuasaan Antara Keturunan Kesultanan Palembang Darussalam
Pada Masa 2003-2006”**

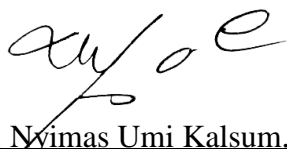
Yang ditulis oleh :

Nama : Aris Ikbal Hairullah
Nim : 1544300006
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka mengikuti Ujian Komprehensif Jurusan Politik Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Nyimas Umi Kalsum, M.Hum
NIP. 19750715 200710 2 003

Palembang, 04 September 2017

Dosen Pembimbing II



Sholeh Khudih, M.Hum
NIP. 19741025 200312 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing skripsi :

1. Dr. Nyimas Umi Kalsum, M.Hum

NIP. 19750715 200710 2 003

2. Sholeh Khudin, M. Hum

NIP. 19741025 200312 1 003

Dengan ini menyetujui bahwa skripsi yang berjudul “KONFLIK KEKUASAAN ANTARA KETURUNAN KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM PADA MASA 2003-2006” yang ditulis oleh:

Nama : Aris Ikbal Hairullah

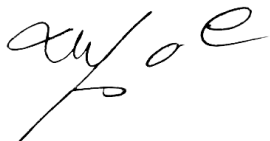
Nim : 1544300006

Jurusan : Politik Islam

Untuk diajukan dalam sidang munaqosah

Palembang, 13 November 2017

Pembimbing I



Dr. Nyimas Umi Kalsum, M.Hum

NIP. 19750715 200710 2 003

Pembimbing II



Sholeh Khudin, M.Hum

NIP. 19741025 200312 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aris Ikbal Hairullah

Nim : 1544300006

Jurusan : Politik Islam

Fakultas : Adab dan Humaniora

Dengan ini sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “KONFLIK KEKUASAAN ANTARA KETURUNAN KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM PADA MASA 2003-2006” adalah benar-benar karya ilmiah saya sendiri, bukan hasil plagiat karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, dan semua kutipan yang ada di skripsi ini telah saya sebutkan sumber aslinya berdasarkan tata cara penulisan kutipan yang lazim pada karya ilmiah.

Palembang, 13 November 2017

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a green 6000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. A unique identification number '07/01/DAFF819451702' is also visible on the stamp.

Aris Ikbal Hairullah

Nim: 1544300006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“KITA MELIHAT KEBAHAGIAAN ITU SEPERTI PELANGI,
TIDAK PERNAH BERADA DI ATAS KEPALA KITA SENDIRI, TETAPI
SELALU BERADA DI ATAS KEPALA ORANG LAIN”*

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda dan Alm. Ayahanda tercinta, beliau adalah penyemangat setiap saat dan menjadi inspirasi sekaligus panutan dalam hal menghadapi kehidupan.
2. Saudara dan Saudari ku, yang selalu membantu dan memberikan masukan serta arahan dalam menghadapi persoalan.
3. Pembimbing akademik, beliau adalah mentor yang selalu memberikan nasehat ketika saya mempunyai masalah di akademik maupun luar akademik.
4. Pembimbing-pembimbing dan orang yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, karena beliau-beliaulah skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya yang baik dan semoga barokah.
5. Guru-guru dan Dosen-dosen terhormat, terima kasih untuk semua dedikasimu, terima kasih untuk semua pengorbananmu, dan terima kasih atas semua ilmu-ilmu mu.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, ridho, barokah dan hidayah-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya yang baik, indah, dan barokah. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada suri tauladan umat yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul: “KONFLIK KEKUASAAN ANTARA KETURUNAN KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM PADA MASA 2003-2006” dapat selesai dengan baik tepat pada waktu yang baik. Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari dukungan dan peran-peran orang yang berjasa yang senantiasa memberikan do’a, motivasi, dan pembelajaran dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT yang membalas kebaikan tersebut.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Terlebih jika tanpa bantuan, bimbingan, serta do’a dan semangat dari semua pihak yang turut mewarnai di dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, izinkan penulis untuk menuturkan ucapan terima kasih yang dalam kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA.Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Nor Huda, M.Ag, M.A selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhammad Syawaluddin, M.A selaku Ketua Program Studi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Bety, S.Ag, M.A selaku Pembimbing Akademik.

5. Ibu Dr. Nyimas Umi Kalsum, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Sholeh Khudin, M.Hum selaku pembimbing II.
6. Dosen-dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.
7. Bapak Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin selaku pembesar di Kota Palembang.
8. Bapak R.M Fauwaz Diradja (Sultan Mahmud Badaruddin IV Jaya Wikrama) selaku pembesar di Kota Palembang.
9. Bapak Kms Ari Pandji, Ustad Andi Syarifuddin, dan Pangeran Nato Rasyid selaku para tokoh-tokoh adat Kota Palembang.
10. Ibunda (Asmiah) dan Alm. Ayahanda tercinta (Hamdan) yang selalu mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.
11. Saudara/i ku yang membuatku selalu semangat dan selalu memberikan yang terbaik untuk adiknya.
12. Semua pihak yang telah banyak turut membantu, baik langsung maupun tidak langsung.
13. Sahabat-sahabat seperjuanganku yaitu mahasiswa/i Politik Islam angkatan 2012. Semoga sukses mengiringi kita di setiap langkah selanjutnya. Amin.

Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran bagi kami ke depannya. Terima kasih.

Palembang, 13 November 2017

Penulis



Aris Ikbal Hairullah

Nim. 1544300006

INTISARI

Kajian Poitik Islam
Jurusan Politik Islam
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah
Skripsi, 2017

Aris Ikbal Hairullah, **Konflik Kekuasaan Antara Keturunan Kesultanan Palembang Darussalam Pada Masa 2003-2006**

xii + 81 hlm + lampiran

Kesultanan Palembang Darussalam saat ini sudah banyak di lupakan oleh semua orang, khususnya bagi orang Sumatera Selatan dan bahkan oleh masyarakat Kota Palembang. Sejak dihapuskannya Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1829 oleh kolonial Belanda, kenangan itu mencoba di bangkitkan kembali dan muncullah 2 tokoh yang merasa pantas sebagai penerus Kesultanan Palembang Darussalam. Berdasarkan latar belakang masalah penulis menyusun sebuah skripsi, di mana dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang Konflik Kekuasaan Antara Keturunan Kesultanan Palembang Darussalam Pada Masa 2003-2006. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji masalah siapa tokoh-tokoh yang memperebutkan gelar sultan di Kesultanan Palembang Darussalam dan mengapa Kesultanan Palembang mempunyai dualisme kepemimpinan kesultanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tokoh-tokoh utama yang memperebutkan gelar sultan di Kesultanan Palembang Darussalam dan mengetahui konflik kekuasaan apa yang terjadi diantara para keturunan Kesultanan Palembang Darussalam.

Untuk menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan teori konflik kekuasaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan berupaya mengungkapkan fenomena melalui teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Data-data yang didapatkan dari lapangan di analisis menggunakan model Miles dan Huberman yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian ini ditemukan, bahwa tokoh-tokoh yang memperebutkan gelar sultan di Kesultanan Palembang Darussalam yaitu Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja dan Ir. H Raden Mahmud Badaruddin dengan gelar Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Terjadinya dualisme kesultanan ini dikarenakan adanya kaum-kaum elit tradisional yang menginginkan Kesultanan Palembang dihidupkan atau dibangkitkan kembali.

Kata Kunci: Konflik, Dualisme.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS KOMPREHENSIF.....	iii
NOTA DINAS MUNAQOSAH	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
INTISARI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Hasil Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II. GAMBARAN UMUM KOTA PALEMBANG	25
A. Letak Geografis	25
B. Keadaan Demografi/Keadaan Penduduk	27
C. Sejarah Kesultanan	31
a. Palembang di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit	34
b. Palembang di bawah kekuasaan Demak-Pajang	35
c. Palembang di bawah kekuasaan Mataram	38

d. Palembang menjadi Kesultanan Palembang	41
BAB III. BIOGRAFI TOKOH	45
A. Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Prabu Diradja, S.H	45
B. Ir. H Raden Mahmud Badaruddin	50
BAB IV. KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM PADA MASA 2003-	
2006	54
A. Pengantar	54
B. Upaya kebangkitan Kesultanan Palembang Darussalam	55
C. Analisis konflik kekuasaan antara keturunan Palembang Darussalam menurut Ralf Dahendorf	66
BAB V. PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

Tabel 1	: Silsilah SMB III Prabu Diradja dan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Hal 61
Tabel 2	: Legalitas Sultan Palembang Darussalam. Hal 63
Lampiran 1	: Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing I dan II
Lampiran 2	: Daftar Hadir Seminar Proposal
Lampiran 3	: SK Skripsi
Lampiran 4	: Surat Izin Penelitian
Lampiran 5	: Transkrip Nilai Sementara
Lampiran 6	: Foto Copy Surat Keterangan Ujian Komprehensif
Lampiran 7	: Surat Keterangan LULUS BTA dan TAHFIDZ AL-Qur'an
Lampiran 8	: Foto Copy Kartu Tanda Mahasiswa
Lampiran 9	: Foto Copy Sertifikat KKN
Lampiran 10	: Foto Copy Sertifikat BTA
Lampiran 11	: Foto Copy Sertifikat PUSKOM
Lampiran 12	: Draf Wawancara Sultan Palembang Darussalam dan Draf Wawancara Tokoh-Tokoh Adat Palembang
Lampiran 13	: Dokumentasi



UIN

**RADEN FATAH
PALEMBANG**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam masuk ke Nusantara bukan untuk menjajah, apalagi untuk menjarah, tetapi Islam datang untuk melakukan pencerahan terhadap masyarakat Nusantara, yang oleh Sukarno dikatakan dalam keadaan sakit. Islam datang menawarkan obat penyembuh dan bertekad untuk membangun Nusantara yang baru berdasarkan syiar-syiar Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan.¹

Berdirinya beberapa Negara Islam di kepulauan Indonesia-Melayu merupakan salah satu bukti kuatnya pengaruh Islam. Selain itu, Islam sebagai faktor eksternal telah berhasil mempersatukan kelompok-kelompok etnis yang terdiri dari atas ratusan suku-suku yang ada di kepulauan ini. Islam Indonesia telah membentuk institusi politik paling awal pada abad ke-13 (XIII). Namun, institusi politik Islam di beberapa daerah tidak sama. Di Sumatera, ada beberapa di antaranya yang telah mengalami perkembangan dalam abad ke-14 (XIV) ataupun abad ke-15 (XV). Abad ke-16 (XVI) telah menjadi saksi munculnya kerajaan baru di medan sejarah, terutama di Jawa. Sebagian besar kerajaan itu lazim disebut kerajaan Islam, sedangkan beberapa daerah di pedalaman masih bersifat Hindu. Perkembangan kerajaan Islam di daerah Maluku, Sulawesi Selatan, dan di daerah lain mulai juga tampak pada abad ke-16 (XVI).²

¹ Darmawijaya, *Kesultanan Islam Nusantara* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2010), h. 2.

² Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 29-30.

Kajian tentang wilayah Sumatera Selatan merupakan kajian yang sangat subur terutama dalam ranah kajian sejarah, khususnya di era Kedatuan Sriwijaya maupun era Kesultanan Palembang Darussalam dan pemerintahan kolonial Belanda. Maraknya kajian ini tidak dapat dilepaskan dari peran penting Sumatera Selatan dalam sistem perdagangan dunia seiring dengan peran penting Kedatuan Sriwijaya.³

Analisis struktur kekuasaan menunjukkan Kesultanan Palembang Darussalam mempunyai keunikan tersendiri berkaitan dengan kebudayaannya, yang diyakini merupakan perpaduan antara budaya Melayu dan Jawa. Bagaimanapun perbedaan budaya politik dan perekonomian berpengaruh besar terhadap proses suksesi. Budaya Melayu yang lebih menitikberatkan perekonomiannya di bidang maritim, tentunya akan berbeda dengan budaya Jawa yang lebih bersifat agraris, karena masa berlangsungnya kerajaan Palembang sejaman dengan kerajaan Demak, Pajang dan Mataram Islam.⁴

Kekuasaan pula bersumber pada kepercayaan atau agama. Di banyak tempat alim ulama mempunyai kekuasaan terhadap umatnya, sehingga mereka dianggap sebagai pemimpin informal yang perlu diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan.⁵

³ Kristantina Indriastuti, Dkk., *Peradaban Masa Lalu Sumatera Selatan* (Palembang: Balai Arkeologi Sumatera Selatan, 2016), h. 141.

⁴ Susi Herti Afriani, Dkk., *Sistem Kekerabatan Marga dan Pengaruhnya dalam Proses Pembentukan Struktur Politik di Sumatera Selatan* (Palembang: NoerFikri Offset bekerja sama dengan Fakultas Adab dan Humaniorah UIN Raden Fatah, 2016), h. 71.

⁵ Ahmad Syukri, *Peran Religio Politik Sayyid Palembang di Semenanjung Melayu Abad 18 dan 19 M* (Yogyakarta: LP2M UIN Raden Fatah Palembang Bekerjasam dengan Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 15.

Kekuasaan adalah suatu gejala kongkret, tetapi tidak dapat dipegang seperti benda. Ia dapat dirasakan akibatnya dan muncul dalam berbagai warna pada kehidupan sosial. Orang mempunyai “kekuasaan” bila ia dapat membuat orang lain melakukan apa yang dia inginkan.⁶ Dalam hal ini mengkaji sistem pengangkatan raja atau sultan tidak dapat dipisahkan dari persoalan institusi sosial dan politik yang hadir di tengah-tengah kekuasaan seperti keturunan, kepercayaan, istana dan lain sebagainya.

Dalam pengertian luas, suksesi politik merupakan cara di mana kekuasaan (kekuatan) politik diwariskan atau ditransfer, dari suatu individu, pemerintahan atau rezim ke individu, pemerintahan atau rezim lainnya. Dalam pengertian sempit, suksesi politik merujuk pada cara dimana berbagai rencana rapi dibuat untuk melakukan transfer kekuasaan sedemikian rupa, sehingga krisis legitimasi bersifat sementara dan tak terelakkan, dapat dikendalikan. Kemampuan untuk melakukan transisi semacam ini pada suatu periode waktu tertentu seringkali dipakai sebagai indikator stabilitas politik. Indikator stabilitas politik lainnya adalah penghindaran terhadap perubahan yang dilakukan melalui praktek-praktek monopoli kekuasaan oleh individu atau kelompok. Kemampuan untuk membedakan antara kedua macam penyelesaian masalah stabilitas politik inilah yang menjadikan konsep suksesi politik memiliki arti penting.⁷

⁶ Miriam Budiardjo, Dkk., *Jurnal Ilmu Politik 4* (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Penerbit PT Gramedia, 1989), h. 15.

⁷ Calvert Peter, *Proses Suksesi Politik* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1995), h. 1-2.

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin *con* berarti bersama dan *fligere* yang berarti benturan atau tabrakan. Di satu sisi, “konflik” dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih.⁸ Konflik akan terus berlanjut selama kepentingannya belum terpenuhi atau tercapai.

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan (power) yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial di dalam Masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan aset sosialnya relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian aset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya.⁹ Di antara konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan. Hal ini tidak mengherankan sebab konsep ini sangat diperhatikan dalam ilmu sosial pada umumnya, dan dalam ilmu politik khususnya. Karena politik sangat dianggap identik dengan kekuasaan. Sumber kekuasaan politik dapat berupa kekayaan atau lain sebagainya.

⁸ Setiadi Elly M dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), h. 54.

⁹ Setiadi Elly M dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 360.

Dari berbagai fenomena kekuasaan yang terjadi diseperti suksesi tahta kerajaan yang paling mendasar adalah munculnya dualisme kepemimpinan meskipun juga bukan hal yang aneh, misalnya Kerajaan Kahuripan dulu juga pecah menjadi dua dahan dan jenggala, Surakarta pecah menjadi dua kesunanan dan mangkunegaran, Yogyakarta menjadi kesultanan dan pakualaman. Kraton Cirebon pecah menjadi kasepuhan dan kanoman. Kerajaan Solo, Yogya dan Cirebon meskipun pecah menjadi dua, ternyata keduanya tetap eksis hingga sekarang dan keduanya mampu menjadi teladan (budaya) bagi masyarakat sekitar yang mengapresiasinya. Sebab faktor geneologi dan kesinambungan tahta raja atau sultan tidak menghilang, meskipun oleh pemerintah kolonial Belanda keberadaan mereka dihapuskan secara statuta pemerintahan. Seperti kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon secara resmi dihapuskan oleh Kolonial Belanda dengan disahkannya Gemeente Cheirebon (Kota Cirebon), yang mencakup luas 1.100 Hektar, dengan penduduk sekitar 20.000 jiwa (Stlb. 1906 No. 122 dan Stlb. 1926 No. 370).¹⁰ Lain halnya dengan kasus yang terjadi di Kesultanan Palembang Darussalam. Kebesaran Kesultanan Palembang Darussalam di masa silam membuat beberapa pihak berupaya untuk membangkitkannya kembali, yakni pengangkatan sultan baru di Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 2003 dan 2006. Kini Kesultanan Palembang dibangkitkan kembali dengan kemunculan dua tokoh yang merasa pantas sebagai pewaris tahta Kesultanan Palembang Darussalam.

¹⁰ Muhammad Syawaludin, “Analisis Sosiologis terhadap Sistem Pergantian Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam”, Jurnal diakses pada tanggal 15 Desember 2016, pkl: 15:23 dari <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/427/378>

Teori Konflik menurut Ralf Dahrendorf adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dimana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya.¹¹

Dahrendorf melihat proses konflik itu dari segi intensitas dan sarana yang digunakan dalam konflik. Intensitas diartikan sebagai tingkat keterlibatan kontestan dalam artian waktu, tenaga, dana, dan pikiran, sedangkan kekerasan (*violence*) diartikan sebagai sarana yang digunakan oleh para kontestan konflik dalam memperjuangkan kepentingan mereka, apakah menggunakan sarana kekerasan fisik ataukah tidak. Dahrendorf berpendapat bahwa konflik tidak dapat diselesaikan sebab menurutnya konflik bersifat dialektik. Bagi Dahrendorf konflik itu akan terus-menerus ada selama kepentingannya belum tercapai. Sementara itu, sesuatu yang dipertahankan itu tentu sangat beragam, bukan hanya keselamatan hidupnya sendiri tetapi juga mempertahankan wilayah daerah tempat dia hidup, kekayaan, keluarganya, status, kekuasaannya, harga dirinya dan lain sebagainya.¹² Kasus pengangkatan yang menimbulkan “konflik” di zaman modern ini, harus membaca proses suksesi kepemimpinan di masa lalu, saat kesatuan politik masih berbentuk kerajaan atau kesultanan, yang di beberapa daerah di Nusantara masih terus berlanjut sampai saat ini.

¹¹ Setiadi Elly M dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), h. 73.

¹² Setiadi Elly M dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi Politik*, h. 74-75.

Hasil musyawarah adat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2003 di Auditorium IAIN Raden Fatah Palembang, yang menginginkan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam penetapan syarat Kesultanan Palembang Darussalam untuk kepentingan sejarah. Maka musyawarah adat kemudian menyusun suatu rancangan yang berisi pedoman atau syarat-syarat menjadi sultan. Adapun isi pedoman atau persyaratan-persyaratan sebagai Sultan Palembang adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam, termasuk keluarganya. Kedua, dari zuriat Kesultanan Palembang Darussalam (diutamakan dari zuriat Sultan Mahmud Badaruddin II). Ketiga, mempunyai bukti Amanah (berupa benda-benda peninggalan dari sultan-sultan Palembang Darussalam). Keempat, dikenal oleh masyarakat Palembang dan kesultanan lainnya. Kelima, dapat mendorong semangat kesatuan dan persatuan masyarakat Palembang Darussalam. Keenam, peduli terhadap peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Ketujuh, tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap pengerusakan atau penjualan aset-aset peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Kedelapan, berani berkorban untuk kemajuan dan kebanggaan zuriat. Kesembilan, bertempat tinggal di Palembang, mengenal Kota Palembang. Kesepuluh, berpendidikan yang tinggi minimal SMA. Kesebelas, berpengalaman dalam berorganisasi.¹³ Jadi jelas pengangkatan seorang sultan di Kesultanan Palembang Darussalam harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan agar kekuasaannya memiliki legitimasi.

¹³ Muhammad Syawaludin, “*Analisis Sosiologis terhadap Sistem Pergantian Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam*”, Jurnal diakses pada tanggal 15 Desember 2016, pkl: 15:23 dari <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/427/378>

Adapun alasan penobatan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin (2017) sebagai berikut:

“Adanya musyawarah mufakat antara zuriat Kesultanan Palembang se-Nusantara dikarenakan sultan terdahulu tidak meninggalkan Wasiat dan dalam silsilah Sultan Palembang. Saya merupakan keturunan dari dua sultan yang pernah berkuasa di Kesultanan Palembang, yaitu Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago dan Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo.”¹⁴

Kemudian pernyataan tokoh berikutnya mengutip dari koran Palembang Ekspres (2003) Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H menyatakan “Saya Menerima Wangsit”.¹⁵ Pernyataan tersebut dibenarkan oleh R.M Fauwaz Diradja yang merupakan penerus Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja yang memerintah sejak Tahun 2003-2017.

Adapun Berdasarkan hasil wawancara dengan R.M Fauwaz Diradja sebagai berikut:

Menurut silsilah Kesultanan Palembang, Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja merupakan keturunan ke-11 dari Sultan Abdurrahman. Sehingga jika dirunut secara garis keturunan, dia adalah putera dari Raden H. Abdul Hamid Prabu Diratdjah IV, bin R.H. Syarif Prabu Diratdjah III, bin R. H. Abdul Habib Prabu Diratdjah II, bin Pangeran Prabu Diratdjah Haji Abdullah, bin Sultan Mahmud Badaruddin Khalifatul Mukminin Sayidul Iman (Sultan Badaruddin

¹⁴ Wawancara Pribadi dengan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, Palembang, 02 Juni 2017.

¹⁵ Palembang Ekspres “Prabu Diradja “Sultan Mahmud Badaruddin III” blak-blakan soal Kesultanan Palembang Darussalam – Saya Menerima Wangsit,” Palembang, 11 Maret 2003, h. 21.

II), bin Sultan Muhammad Bahauddin, bin Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo, bin Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (Sultan Badaruddin I), bin Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago, bin Sultan Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayidul Iman (Kiai Mas Endi Pangeran Ario Kusumo).¹⁶

Dalam hal ini konflik bukan terjadi dalam masyarakat tetapi terjadi dalam rana kepemimpinan kesultanan lebih tepatnya di Kesultanan Palembang, hal inilah yang memacu penulis untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai dualisme kepemimpinan kesultanan di Kesultanan Palembang Darussalam.

Dahrendorf mengungkapkan “Bilamana kelompok-kelompok kepentingan bertemu dalam asosiasi dan dalam beberapa pertikaian, maka semua energi yang mereka gunakan akan disatukan dan sebuah konflik kepentingan yang keras akan lahir”¹⁷

Manakala seorang sultan meninggal dunia ataupun diturunkan dari tahtanya karena dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran adat atau lain sebagainya, maka sultan baru harus segera dipilih dan dilantik untuk mengisi jabatan sultan yang kosong.¹⁸ Hal menarik bagi penulis, sejak Kesultanan Palembang Darussalam hilang keberadaannya ada beberapa pihak yang berupaya membangkitkannya kembali dan muncul dua tokoh yang merasa mereka pantas sebagai penerus tahta kesultanan di Kesultanan Palembang Darussalam.

¹⁶ Wawancara Pribadi dengan R.M Fauwaz Diradja, Palembang, 19 September 2017.

¹⁷ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 137-138.

¹⁸ Tony Rudyansjah. *Kekuasaan, Sejarah, & Tindakan (Sebuah Kajian Tentang Lanskap Budaya)*, 2009. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, h. 150.

Dari data yang penulis kumpulkan, dalam penelitian mengenai Kesultanan Palembang Darussalam. Penulis akan meneliti mengenai konflik apa yang terjadi diantara keturunan Kesultanan Palembang Darussalam yang menyebabkan Kesultanan Palembang Darussalam mempunyai dua tokoh yang merasa mereka pantas sebagai pewaris tahta kesultanan di Kesultanan Palembang Darussalam, sehingga Kesultanan Palembang Darussalam memiliki dualisme kepemimpinan kesultanan di Kesultanan Palembang Darussalam, dan penulis juga akan meneliti mengenai legalitas yang di miliki oleh dua orang sultan di Kesultanan Palembang Darussalam berdasarkan pada karakteristik legalitas kekuasaan dalam sistem Kesultanan Melayu Islam.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk menulis dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai Kesultanan Palembang Darussalam, dengan judul: *“Konflik Kekuasaan Antara Keturunan Kesultanan Palembang Darussalam Pada Masa 2003-2006”* sebagai tambahan karya ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini fokus dan dapat menghasilkan pembahasan yang optimal dan terukur, maka perlu rumusan masalah penelitian sebagaimana berikut:

- a. Siapa tokoh-tokoh yang memperebutkan gelar Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam?
- b. Mengapa Kesultanan Palembang Darussalam mempunyai dualisme kepemimpinan kesultanan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian “Konflik Kekuasaan Antara Keturunan Kesultanan Palembang Darussalam Pada Masa 2003-2006”, peneliti mempunyai/memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui tokoh-tokoh utama yang memperebutkan gelar Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam.
- b. Mengetahui konflik kekuasaan apa yang terjadi diantara para keturunan Kesultanan Palembang Darussalam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana umumnya penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, serta memberikan ilmu yang banyak baik bagi peneliti pada khususnya dan terlebih lagi untuk masyarakat luas. Adapun penulis berharap antara lain sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas dan memberikan hasil yang kritis terkait dengan dua kepemimpinan kesultanan berbeda di Kesultanan Palembang Darussalam, baik pembaca yang tinggal di Sumatera Selatan khususnya di Palembang.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pemahaman keilmuan khususnya ilmu politik dalam hal mengkaji sesuatu kekuasaan.
- c. Dapat dijadikan bahan rujukan bagi mata kuliah Politik, Sosiologi, Sejarah, serta Budaya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan unsur penting dari proposal penelitian, karena berfungsi menjelaskan posisi masalah yang akan diteliti di antara penelitian yang pernah dilakukan peneliti lain dengan maksud untuk menghindari tidak terjadi duplikasi (plagiasi) penelitian. Karena itu, peneliti harus mencari tahu berbagai penelitian atau tulisan terdahulu, baik skripsi, tesis, disertasi, maupun buku teks dan artikel dalam jurnal ilmiah yang terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti dengan cara menghimpunnya dan membacanya kemudian menuliskannya dengan menyebut judul, masalah, fokus bahasannya. Setelah semua tulisan/hasil penelitian terdahulu dideskripsikan dengan ringkas, tegas dan jelas, lalu peneliti membuat pernyataan tentang posisi penelitiannya di antara penelitian-penelitian terdahulu yang sudah di informasikan.¹⁹ Maka, di bawah ini penyusun menyajikan beberapa penelitian-penelitian yang telah atau sudah dilakukan sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Elpi Andayani Tahun 2007 Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul “*Peranan Intelektual Islam Pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam*”. Skripsi ini membahas tentang eksistensi intelektual Islam maksudnya dalam lingkungan Kesultanan Palembang Darussalam sendiri memiliki ulama-ulama yang terpilih, yang dipilih oleh sultan. Ulama kesultanan dijadikan guru sultan dan keluarganya dalam mempelajari dan

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Adab* (Palembang: Fakultas Adab, 2013), h. 19.

memahami ajaran-ajaran agama Islam. Juga bertugas sebagai penasihat pribadi sultan dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan.

Pitria Tahun 2010 Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul "*Pemberontakan Masyarakat Bangka Masa Kesultanan Palembang Darussalam*". Skripsi Pitria ini membahas tentang kondisi-kondisi dan situasi masyarakat Bangka sebelum terjadinya pemberontakan pada tahun 1816-11819.

Rahmawaty Siregar Tahun 2004 Skripsi Mahasiswa Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul "*Menelusuri Pewaris Tahta Kesultanan Palembang Darussalam*". Skripsi Rahmawaty Siregar ini hanya membahas tentang Silsilah Sultan Mahmud Badaruddin II dan konflik-konflik internal yang terjadi di kesultanan Palembang khususnya pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II.

Muhammad Ilham Tahun 2015 Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang yang berjudul "*Diplomasi Politik Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda Berdasarkan Surat-Surat Melayu Abad ke 19*". Tesis Muhammad Ilham ini hanya membahas tentang Kerajaan Sriwijaya sampai terbentuknya Kesultanan Palembang Darussalam, Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan diplomasi politik yang dilakukan Sultan Mahmud Badaruddin II.

Ravico Tahun 2013 Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang yang berjudul “*Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821*”. Tesis Ravico ini hanya membahas konflik yang terjadi pada masa Sultan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sqayidatul Imam sampai Sultan Mahmud Badaruddin II. Selain itu, penelitiannya menjelaskan konflik-konflik internal yang terjadi di lingkungan Kesultanan Palembang, khususnya konflik yang terjadi pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II.

Dari beberapa penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu lebih menspesifikasikan terhadap konflik yang terjadi di antara keturunan Kesultanan Palembang Darussalam dan siapa saja tokoh yang memperebutkan gelar sultan di Kesultanan Palembang Darussalam sehingga Kesultanan Palembang memiliki dualisme Kesultanan. Karna secara umum historiografi Kesultanan Palembang Darussalam resmi dihapuskan oleh kolonialisme Belanda dan muncul kembali dua tokoh yang merasa pantas sebagai penerus kesultanan di Kesultanan Palembang Darussalam.

Di samping itu penulis sudah mencari atau memeriksa daftar perpustakaan untuk mengetahui apakah permasalahan yang akan penulis teliti sudah ada mahasiswa yang membahas atau meneliti. Setelah diadakan pemeriksaan terhadap perpustakaan-perpustakaan, ternyata penulis belum menemukan mahasiswa yang membahas dan meneliti judul skripsi yang akan penulis bahas.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kajian teoritis dan konseptual yang dikutip dari pendapat para pakar terkait/berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.²⁰ Perkembangan ilmu politik sebagai disiplin ilmu yang didalamnya meliputi perkembangan teori politik secara umum mengikuti tahap-tahap: pendekatan tradisional, pendekatan perilaku dan pendekatan pascaperilaku. Teori-teori yang dilahirkanpun mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perubahan yang dialami dalam studi ilmu politik, khususnya perubahan yang terjadi karena adanya pergeseran yang digunakan oleh para pemikir politik dalam menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu politik. Pendekatan yang paling awal atau paling kuno biasanya lebih disebut dengan pendekatan klasik atau pendekatan tradisional.²¹

Secara sederhana teori sebagaimana dikemukakan oleh Riswanda Imawan, dapat dipahami sebagai *organized system of concepts* (konsep-konsep yang terorganisir). Pemahaman teori sebagaimana dikemukakan di atas masih umum. Definisi yang lebih fokus dikemukakan oleh Blalock, menurutnya teori adalah “*a set of propositions that explain of social phenomenon,*” (satu rangkaian proposisi yang menjelaskan satu fenomena sosial). Sementara itu, Baily menyatakan bahwa teori adalah “*set of propositions that attempts to explain and to predict a particular phenomenon and that proposition is testable,*” (teori adalah seperangkat proposisi

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Adab* (Palembang: Fakultas Adab, 2013), h. 19.

²¹ Nasiwan, *Teori-Teori Politik* (Cetakan I: UNY Press bekerjasama dengan FISE UNY, Yogyakarta, 2007), h. 1.

yang mampu menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena khusus dan karenanya proposisi tersebut dapat diuji).²²

Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai “kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain untuk berperilaku sesuai dengan kehendaknya.” Kekuasaan juga menurutnya ada yang tidak legitim dan ada yang legitim. Kekuasaan yang tidak legitim adalah kontrol yang dijalankan atas orang lain yang tidak mengakui hak dari mereka yang menjalankan kekuasaan untuk melakukan demikian. Jadi kekuasaan yang tidak legitim itu membutuhkan penggunaan atau ancaman kekuasaan fisik untuk memaksakan kepatuhan. Sebaliknya, kekuasaan yang legitim adalah kontrol yang dijalankan atas orang lain berdasarkan persetujuan mereka (orang-orang yang dikontrol itu) yang menjalankan kekuasaan itu memiliki hak untuk melakukan demikian.²³

Metode analisa yang digunakan dalam ilmu politik dan merupakan hasil pengaruh yang kuat dari teori sistem umum dikenal sebagai “fungsionalisme”, “fungsional struktural” atau “analisa sistem” namun fungsionalisme struktural merupakan istilah yang lebih umum dipakai. Fungsionalisme struktural telah lama menjadi kerangka yang begitu penting untuk penelitian sosiologi, sebelum ia dipergunakan dalam ilmu politik. Analisa fungsional struktural adalah “struktur”. Sementara fungsi berurusan dengan akibat-akibat atau konsekuensi-konsekuensi yang

²² Nasiwan, *Teori-Teori Politik* (Cetakan I: UNY Press bekerjasama dengan FISE UNY, Yogyakarta, 2007), h. 13.

²³ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 190-191.

melibatkan tujuan-tujuan serta proses-proses dari suatu pola tindakan, struktur menunjuk kepada susunan-susunan dalam sistem yang melakukan fungsi-fungsi.²⁴ Bagian ini merupakan unsur yang paling penting didalam penelitian, karena pada bagian ini peneliti mencoba menjelaskan fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan teori-teori relevan dengan penelitian. Oleh karena itu, untuk membahas permasalahan seputar Kesultanan Palembang Darussalam, penyusun menggunakan teori konflik yang dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf.

Teori konflik bertujuan mengatasi watak yang secara dominan bersifat arbitrer (melerai) dari peristiwa-peristiwa sejarah yang tidak dapat dijelaskan, dengan menurunkan peristiwa-peristiwa tersebut dari elemen-elemen struktur sosial. Dengan kata lain, menjelaskan proses-proses tertentu dengan penyajian yang bersifat ramalan. Teori konflik adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dimana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Dahrendorf menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama (kemudian dia menyempurnakan posisi ini dengan menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat dianalisa dengan fungsionalisme struktural dapat pula dianalisa dengan teori konflik dengan lebih baik).²⁵ Dalam kasus ini konflik bukan terjadi di dalam sebuah

²⁴ S.P. Varma, *Teori Politik Modern* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 67-68.

²⁵ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 129-130.

masyarakat tetapi terjadi di dalam kesultanan, terpilihnya kedua tokoh tersebut pasti mempunyai kepentingan tersendiri.

Untuk proses apapun dalam suksesi politik, secara teoritis kita dapat membedakan tiga model inisiasi (*modes of initiation*) model-model tersebut yaitu: suksesi karena berbagai alasan politik, suksesi karena alasan alami (kematian), dan suksesi setelah adanya pengunduran diri secara suka rela dari orang yang memegang kekuasaan.²⁶ Karena itu, suksesi tidak hanya mempersoalkan masalah penerimaan atau tindakan memilih seorang pengganti, melainkan serangkaian keputusan untuk melakukan penerapan pilihan itu. Pada akhirnya, sebuah proses suksesi tidak hanya melibatkan suatu proses persaingan diantara beberapa pemegang kekuasaan tetapi juga suatu interaksi antara pemerintah dengan pihak yang diperintah dan lain sebagainya.

Tokoh Pertama yaitu Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja. Ada dua alasan yang mendasari pengangkatan Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H. Pertama, Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H mengaku menjadi Sultan Mahmud Badaruddin III karena menerima wangsit. Kedua, menurut silsilah Kesultanan Palembang Darussalam, Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H merupakan keturunan ke-11 dari Sultan Susuhunan Abdurrahman sampai Sultan Raden Haji Abdul Hamid Prabu Diratdjah S.H.²⁷

²⁶ Calvert Peter, *Proses Suksesi Politik* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1995), h. 81-82.

²⁷ Wawancara Pribadi dengan R.M Fauwaz Diradja, Palembang, 19 September 2017.

Tokoh Kedua yaitu Ir. H Raden Mahmud Badaruddin dengan gelar Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Menurut silsilah Kesultanan Palembang Darussalam, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin merupakan keturunan dari dua sultan yang pernah berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam, yaitu Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago dan Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo.²⁸

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik atau pengkajian terhadap langkah-langkah metode penelitian dan dalam penulisan karya ilmiah. Istilah “Metode Penelitian” terdiri dua kata, metode dan penelitian. Metode berasal dari kata Yunani yaitu *methodos* yang bearti cara untuk mencapai sasaran atau tujuan dalam pemecahan suatu permasalahan. Kata yang mengikutinya adalah penelitian yang berarti suatu usaha untuk mencapai sesuatu dengan metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis dan sempurna terhadap masalah yang dihadapi.²⁹

Dalam setiap penelitian dan penulisan karya ilmiah baik makalah, skripsi, tesis dan lain-lain dibutuhkan suatu metode agar dapat diakui sebagai karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, adapun metode penelitian sendiri berarti cara yang harus dilalui dalam rangka pendalaman terhadap objek yang dikaji.³⁰

²⁸ Wawancara Pribadi di kediaman Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, Palembang, 02 Juni 2017.

²⁹ Tim Penyusun, *Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Adab* (Palembang: Fakultas Adab, 2013), h. 21.

³⁰ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Bandung: CV. Transito. 1982), hal. 7.

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis penelitian ini adalah kualitatif fenomenologis yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang atau perilaku yang dapat diamati terhadap fenomena atau apa-apa yang nampak. Sementara metode pendekatan yang dilakukan penyusun dalam penelitian skripsi ini akan menggunakan pendekatan sosiologis karena dalam penelitian sosial bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai situasi dan kondisi, serta fenomena yang terjadi pada masa Kesultanan Palembang khususnya yang sekarang dan dengan demikian pendekatan ini melakukan penelaahan terhadap obyek suatu ilmu sosiologi yaitu wawancara. Untuk mempertajam studi ini, maka akan dilakukan pengambilan tema tertentu saja dari konflik kekuasaan antara keturunan Kesultanan Palembang Darussalam pada masa 2003-2006. Misalnya konflik apa yang terjadi diantara keturunan Kesultanan Palembang dan hal apa saja yang mendasari penyebab terjadi dualisme kepemimpinan kesultanan di Kesultanan Palembang Darussalam.

b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ada dua, yakni *primer* dan *sekunder*. Data *primer* merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer disebut juga dengan data asli atau data baru yang bersifat *up to date*. Pada tahap ini sumber data yang diambil penulis diperoleh secara langsung dari orang yang mempunyai kaitan dengan

Kesultanan Palembang Darussalam. Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan wawancara serta dokumentasi. Sedangkan data *sekunder* merupakan data yang diperoleh melalui sumber-sumber berbagai buku-buku, literatur, jurnal koran, majalah, dan internet yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi motivasi dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.³¹ Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada kedua orang tokoh sultan di Kesultanan Palembang Darussalam yaitu Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H.³² dan Ir. H Raden Iskandar Mahmud Badaruddin. Penulis juga meminta bantuan kepada para tokoh lokal yaitu, Kepala Bagian Takmir Peribadatan (Kemas H. Andi Syarifudin), dan Pemangku Adat (Kemas Ari Pandji, Pangeran Nato Rasyid dan Nyimas Umi Kalsum). Selain itu orang lain yang tak terduga terlibat untuk lebih mempertajam mengenai penelitian yang akan penulis bahas.

³¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Perss, 2012), h. 155.

³² Pada saat penelitian ini berlangsung Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja meninggal dunia pada tanggal 07 Septemeber 2017, dengan demikian wawancara akan diwakilkan oleh anaknya R.M Fauwaz Diradja yang merupakan penerus Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk lebih memahami berbagai data sejarah yang ditemukan. Misalnya suatu gambaran berupa Kronologi, dan kesimpulan yang kuat terhadap obyek penelitian. Teknik dokumentasi adalah mencari mengenai variable yang berupa catatan, buku, notulen rapat, foto gambar, grafik, katalog, majalah dan sebagainya.³³

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁴

Teknik menganalisis data pada penelitian ini menggunakan Model Miles and Huberman, yaitu mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. data reduction

Data yang didapat di lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, terinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu pendekatan praktik* (Jakarta: rineka cipta, 2002), h. 133.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 244.

yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Data display

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Conclusion Drawing/verification

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁵

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 337-345.

H. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini dikemukakan secara singkat format laporan penelitian yang akan disusun yang dikelompokkan ke dalam bab-bab.³⁶ Untuk lebih terarahnya penelitian ini, berikut ini peneliti akan mengemukakan sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini memaparkan atau membahas beberapa hal pokok permasalahan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab II merupakan gambaran umum Kota Palembang. Bab ini memaparkan letak geografis, keadaan penduduk, dan sejarah Kesultanan Palembang Darussalam. Bab III merupakan biografi kedua tokoh Kesultanan Palembang Darussalam. Bab ini memaparkan biografi Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H dan Ir. H Raden Mahmud Badaruddin. Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini memaparkan tentang analisis konflik kekuasaan antara keturunan Kesultanan Palembang Darussalam, serta aspek legalitas yang dimiliki oleh SMB III Prabu Diradja dan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Bab V merupakan penutup. Bab ini adalah kesimpulan dan saran, di mana bagian akhir merupakan simpulan atas keseluruhan pembahasan tulisan ini, yang diharapkan dapat memberikan suatu kaitan atau hubungan dari uraian dari pada bab-bab sebelumnya, yang kemudian menjadi suatu rumusan yang bermakna.

³⁶ Tim Penyusun, *Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Adab* (Palembang: Fakultas Adab, 2013), h. 22-23.



UIN

**RADEN FATAH
PALEMBANG**

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA PALEMBANG

A. Letak Geografis

Kota Palembang merupakan salah satu Kota Metropolitan yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan, terletak pada posisi antara 2^o52' sampai 3^o5' Lintang Selatan dan antara 104^o37' sampai 104^o52' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Luas wilayah kota Palembang sebesar 40,061 km² atau sekitar 2,65% dari total luas daratan Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan peraturan pemerintahan Nomor 23 Tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Secara administrasi Kota Palembang terbagi atas 16 (enam belas) Kecamatan dan 107 (seratus tujuh) Kelurahan.³⁷

Keadaan alam kota Palembang merupakan daerah tropis lembah nisbi, di mana suhu udara sebagian besar wilayah kota Palembang pada Tahun 2014 berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II. Berkisar antara 21,4^o C sampai 36,0^o C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan November sedangkan suhu udara minimum terjadi di bulan September.³⁸

³⁷ Laporan Kinerja Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2014, (Palembang: Pemerintahan Kota Palembang), h. 4.

³⁸ Laporan Kinerja Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2014, h. 6.

Propinsi Sumatera Selatan merupakan suatu kawasan seluas 109.254 kilometer persegi di pulau Sumatera dan terletak di sebelah Selatan garis khatulistiwa pada 1-4 derajat lintang Selatan dan 102-108 derajat bujur Timur. Bagian daratan propinsi ini berbatas dengan propinsi Jambi di sebelah Utara propinsi Barat. Sedang di bagian Timur berbatasan dengan propinsi Bangka-Belitung. Sumatera Selatan dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya karena wilayah ini pada abad 7-12 Masehi merupakan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Indonesia yang berpengaruh sampai ke Formosa dan Cina di Asia serta madagaskar di Afrika. Disamping itu, Sumatera Selatan sering juga disebut daerah Batanghari Sembilan, karena di kawasan ini terdapat Sembilan sungai besar yang dapat dilayari sampai jauh ke hulu. Yakni, sungai Musi, Ogan, Komering, Lematang, Kelingi Rawas, Batanghari Leko dan Lalan serta puluhan cabang-sabangnya.³⁹

Propinsi Sumatera Selatan dengan ibu kotanya adalah Palembang terbagi dalam 16 kabupaten dan kota, diantaranya yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu (OKU Induk), OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim, Lahat, Kota Administrasi Pagaralam, Musi Rawas (Mura), Kota Administrasi Lubuk Linggau, Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Pagan Ilir, Kota Administrasi Prabumulih dan Kota Palembang.⁴⁰

³⁹ Susi Herti Afriani, Dkk., *Sistem Kekerabatan Marga dan Pengaruhnya dalam Proses Pembentukan Struktur Politik di Sumatera Selatan* (Palembang: NoerFikri Offset bekerja sama dengan Fakultas Adab dan Humaniorah UIN Raden Fatah, 2016), h. 37.

⁴⁰ Susi Herti Afriani, Dkk., *Sistem Kekerabatan Marga dan Pengaruhnya dalam Proses Pembentukan Struktur Politik di Sumatera Selatan*, h. 39.

Kota Palembang pada tahun 1553-1814 merupakan ibukota Kesultanan Palembang. Kemudian pada masa kolonial Belanda menjadi ibukota Residensi Palembang. Residensi Palembang ini merupakan salah satu dari tiga residensi yang terdapat di Sumatera bagian Selatan. Luas Karesidenan Palembang kurang lebih 84.692 km². Daerah Palembang sebagian besar dataran rendah tempat mengalirnya Sungai Musi beserta anak cabangnya. Keterikatan penduduk dengan lalu lintas di perairan Sungai Musi yang padat dengan perahu-perahu dayung dan kapal-kapal yang datang pergi, membawa kota Palembang dijuluki sebagai Venesia van Indie. Satu segi yang paling esensial yang tak dapat diragukan dalam mengulas lingkungan alam Palembang adalah ketergantungan penduduk setempat terhadap lalu lintas perairan sungai. Sungai Musi merupakan sungai terbesar di daerah ini yang membelah Kota Palembang menjadi dua. Ciri daerah aliran sungai, bukanlah khusus untuk kota Palembang saja, melainkan untuk Sumatera Selatan umumnya. Sebutan lain untuk daerah ini adalah Batanghari Sembilan, suatu daerah “tradisional” untuk menyebut sembilan buah sungai besar yang merupakan anak Sungai Musi, yakni: Klingi, Bliti, Lakitan, Rawa, Rupit, Batang, Leko, Ogan, dan Komering.⁴¹

B. Keadaan Demografi/Keadaan Penduduk

Sumatera Selatan berpenduduk sebanyak 7.775.800 jiwa, dengan kepadatan rata-rata 69 jiwa/km². Penduduk asli terdiri dari beberapa suku yang masing-masing

⁴¹ Susi Herti Afriani, Dkk., *Sistem Kekerabatan Marga dan Pengaruhnya dalam Proses Pembentukan Struktur Politik di Sumatera Selatan*, h. 39-40.

mempunyai bahasa dan dialek sendiri-sendiri. Suku-suku yang ada di kota Sumatera Selatan itu sendiri antara lain Suku Palembang, Ogan, Komering, Semendo, Pasemah, Gumay, Lematang, Musi Rawas, Meranjat, Kayu Agung, Ranau, Kisam, Belitung, dan lain-lain. Semua suku-suku ini hidup berdampingan dan saling membaaur dengan suku-suku pendatang termasuk dengan orang-orang asing. Bahkan banyak terjadi perkawinan antar suku. Setiap suku-suku memiliki adat istiadat dan tradisi tersendiri yang tercermin dalam upacara perkawinan dan peristiwa-peristiwa penting dalam suatu suku.⁴²

Jumlah Penduduk Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan. Dinas kependudukan dan catatan Sipil Palembang periode 31 Desember 2014 sebanyak 1.736.551 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 882.216 jiwa dan perempuan sebanyak 854.335 jiwa, menurun 43.955 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 1.780.506 jiwa dibandingkan pada tahun sebelumnya tahun 2013, dengan laju pertumbuhan penduduk di tahun 2014 sebesar 4,3%.⁴³

Penduduk kota Palembang mayoritas memeluk agama Islam. Melihat data Badan Pusat Statistik kota Palembang tahun 2014 yang beragama Islam berjumlah 1.585.176 jiwa dan beragama lain 151.375 jiwa. Islam (93,08%), Protestan (1,97%),

⁴² Susi Herti Afriani, Dkk., *Sistem Kekerabatan Marga dan Pengaruhnya dalam Proses Pembentukan Struktur Politik di Sumatera Selatan* (Palembang: NoerFikri Offset bekerja sama dengan Fakultas Adab dan Humaniorah UIN Raden Fatah, 2016), h. 37-38.

⁴³ Laporan Kinerja Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2014, (Palembang: Pemerintahan Kota Palembang), h. 9.

Katolik (1,16%), Hindu (0,05%), Budha (3,41%), Kong Hu Cu (0,04%), dan lain-lain (0,28%).⁴⁴

Kecamatan	2014				
	Jumlah Penduduk Yang Menganut Agama				
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
Iilir Barat II	68 722	992	806	25	2 877
Gandus	67 304	189	165	3	117
Seberang Ulu I	184 811	690	501	75	2 433
Kertapati	98 316	359	112	28	561
Seberang Ulu II	100 631	688	341	31	839
Plaju	94 103	728	380	47	692
Iilir Barat I	137 109	2 220	1 555	110	6 567
Bukit Kecil	46 676	836	671	62	1 578
Iilir Timur I	60 381	4 686	5 934	106	17 229
Kemuning	84 767	2 337	1 304	17	5 042
Iilir Timur II	170 086	5 257	3 811	131	11 518
Kalidoni	114 790	3 086	1 652	63	3 081
Sako	86 291	3 860	2 117	72	2 764
Sematang Borang	36 104	2 186	999	6	207
Sukarami	145 383	4 812	2 556	112	3 130
Alang-alang Lebar	88 702	2 788	945	77	4 063
Kota Palembang	1 585 176	35 714	23 849	965	62 698

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palembang.

⁴⁴ Data diperoleh dari, Badan Pusat Statistik Kota Palembang (Bps Kota Palembang), pada tanggal 17 Oktober 2017.

Kota Palembang yang terletak pada kedua tepi Sungai Musi dimana Sungai Ogan pada bagian Barat dekat kertapati, sungai komering pada bagian Timur dekat Plaju dan Sungai Gerong dimuka Pulau Kemaro. Tentunya dulu dibangun berdasarkan pertimbangan seksama, sehingga semua lalu lintas yang melalui sungai-sungai digunakan oleh penduduk Uluu untuk membawa hasil bumi dan hasil hutan lainnya ke ibukota.⁴⁵

Bahkan suku-suku di Sumatera Selatan memiliki seni dan budaya sendiri yang saling berbeda atau hampir bersamaan. Meski tiap penduduk etnik memiliki corak khas dalam kebudayaan dan struktur bahasa sendiri, namun tetap merupakan suatu kesatuan yang bulat yang sulit dipisahkan satu sama lain dalam lingkungan hukum adat di daerah Sumatera Selatan. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, meskipun demikian, ada juga penduduk yang memeluk agama lain, seperti: Kristen Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu. Bahkan ada juga yang memeluk aliran kepercayaan Kong Fhu Chu.⁴⁶

Kelima agama dan aliran kepercayaan itu hidup bersama-sama, saling berdampingan bahkan saling membaur tanpa menimbulkan suatu permasalahan dalam kehidupan. Hari-hari umum dirayakan dengan sangat Khidmat, seperti hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulud, Isra Mi'radj, Nuzul Quran, Natal, Paskah,

⁴⁵ Muhammad Ilham. "Diplomasi Politik Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda Berdasarkan Surat-Surat Melayu Abad ke 19", *Tesis* (Program Pascasarjan UIN Raden Fatah Palembang, 2015), h. 23.

⁴⁶ Susi Herti Afriani, Dkk., *Sistem Kekerabatan Marga dan Pengaruhnya dalam Proses Pembentukan Struktur Politik di Sumatera Selatan* (Palembang: NoerFikri Offset bekerja sama dengan Fakultas Adab dan Humaniorah UIN Raden Fatah, 2016), h. 38.

Waisak, Tahun Baru Cina (Sin Cia), Nyepi dan lain sebagainya. Serta pembangunan Masjid, Mushollah, Gereja, Kapel, Kring, Wihara, Kelenteng, serta Pure hampir terdapat di setiap pelosok.⁴⁷

Gambaran masyarakat Palembang masa lalu dapat diperkirakan serupa dengan masa kini di mana keberadaan sungai mempunyai arti yang penting bagi penduduknya. Sungai bagi masyarakat Palembang merupakan jalur transportasi terutama dalam membawa berbagai jenis barang dari dan ke daerah pedalaman atau dari dan ke wilayah-wilayah di luar Palembang. Di sepanjang sungai tersebut banyak didirikan rumah-rumah bertiang maupun rumah-rumah yang didirikan di atas pondasi yang ditinggikan.⁴⁸

C. Sejarah Kesultanan Palembang

Jauh sebelum berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam telah berdiri kerajaan terbesar di Asia Tenggara yaitu Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 M. Kerajaan Sriwijaya telah berhasil menguasai seluruh perdagangan Asia Tenggara. Sriwijaya berhasil menguasai Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Karimata, dan Tanah Gneting Kra. Dengan penguasaan wilayah-wilayah tersebut menjadi Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara.⁴⁹

⁴⁷ Susi Herti Afriani, Dkk., *Sistem Kekerabatan Marga dan Pengaruhnya dalam Proses Pembentukan Struktur Politik di Sumatera Selatan*, h. 38.

⁴⁸ Kristantina Indriastuti, Dkk., *Peradaban Masa Lalu Sumatera Selatan* (Palembang: Balai Arkeologi Sumatera Selatan, 2016), h. 95.

⁴⁹ Ravico. *Konflik Elit Politik Di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821*, Tesis (Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang, 2013), h. 36-37.

Selain menguasai perdagangan di Asia Tenggara, hubungan perdagangan internasional Kerajaan Sriwijaya menghubungkan negeri-negeri yang berada di wilayah Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Asia Timur jauh melalui Selat Malaka. Hubungan pelayaran dan perdagangan menghubungkan tiga kerajaan besar sejak abad ke-7 M yaitu Dinasti Tang di Cina, Kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara dan Dinasti Umayyah di Asia Barat. Selanjutnya, hubungan antara Dinasti Umayyah dan Kerajaan Sriwijaya membuka jalur-jalur Islamisasi di Palembang yang kelak melahirkan Kesultanan Palembang Darussalam. Secara tidak langsung Kerajaan Sriwijaya ikut serta dalam penyebaran Islam di Nusantara. Paling tidak Kerajaan Sriwijaya memberikan kebebasan beragama di wilayahnya. Akibat dibukanya jalur perdagangan Internasional tersebut Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang sangat pesat baik di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Hal tersebut Kerajaan Sriwijaya patut diperhitungkan, sehingga banyak kerajaan-kerajaan yang melakukan hubungan kerja sama. Bentuk kerja sama ini tidak hanya menghasilkan keuntungan belaka, namun terdapat juga kerugian yang ditimbulkan dari kerja sama tersebut.⁵⁰

Upaya memperkuat ekonomi, Kerajaan Sriwijaya melakukan hubungan dengan kerajaan di India. Kerajaan Pala diperkuat dengan hubungan agama yaitu Agama Budha, banyak pendeta dari Kerajaan Sriwijaya yang belajar di Perguruan Tinggi Nadala (India). Hubungan dilakukan juga dengan Kerajaan Chola. Hubungan

⁵⁰ Ravico. Konflik Elit Politik Di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821, *Tesis*, h. 38-40.

persahabatan ini berubah menjadi permusuhan, ketegangan tersebut dipicu oleh persaingan dibidang pelayaran dan perdagangan. Tahun 1025 Kerajaan Chola melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Sriwijaya, akibatnya Kerajaan Sriwijaya kehilangan hak monopoli atas lalu lintas perdagangan India-Cina. Setelah peristiwa ini, kekuatan dan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Tahun 1088, Kerajaan Melayu Jambi mencoba menggantikan peran Kerajaan Sriwijaya dalam hubungan dagang dengan Cina, namun Cina tidak mengakuinya. Pada abad ke-13, Kerajaan Sriwijaya hanya terbatas di wilayah Palembang dan sekitarnya. Kemunduran kekuasaan dan lemahnya kekuatan Kerajaan Sriwijaya dimanfaatkan oleh Kerajaan Majapahit. Tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya harus mengakui dan tunduk kepada Kerajaan Majapahit. Selepas penaklukan, ternyata Majapahit tidak dapat mengontrol wilayah Palembang dengan baik yang berakibat terjadinya dominasi oleh para saudagar dari Cina (Tiongkok). Pengaruh kuat orang-orang Cina berakhir ketika raja Kerajaan Majapahit Prabu Brawijaya V mengirimkan utusannya untuk memimpin Palembang, bernama Adipati Arya Damar.⁵¹

Pada awalnya Palembang merupakan pusat Kerajaan Budha Sriwijaya. Setelah Sriwijaya jatuh, maka Palembang menjadi daerah protektorat dari kerajaan-kerajaan Jawa, seperti Kerajaan Hindu Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, dan Kesultanan Mataram.⁵²

⁵¹ Ravico. Konflik Elit Politik Di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821, *Tesis* (Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang, 2013), h. 40-41.

⁵² Darmawijaya, *Kesultanan Islam Nusantara* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2010), h. 57-59.

a. Palembang di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit.

Arya Damar kemudian berhasil menakhlukkan Palembang. Keberhasilannya menakhlukkan Palembang, membuatnya menjadi raja dan memimpin tahun 1455-1486 untuk wilayah Palembang. Arya Damar kemudian memeluk Islam dan mengganti namanya Arya Abdillah atau Arya Dillah. Keberhasilan Arya Damar merupakan kabar gembira bagi Kerajaan Majapahit, di sisi lain terjadi konflik internal Kerajaan. Dimana para selir sangat cemburu terhadap Putri Champa ketika Prabu Brawijaya V menikahinya. Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan dan mengganggu stabilitas kerajaan. Kemudian Putri Champa dikirim ke Palembang.⁵³ Di sinilah konflik-konflik internal yang terjadi pada masa Palembang di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit.

Pada waktu dikirimkan ke Palembang, Putri Champa ini dalam keadaan hamil, tidak lama setelah itu Putri Champa ini melahirkan seorang Bayi yang dinamakan Raden Fatah yang kelak menjadi raja dari kerajaan Islam di Pulau Jawa. Puteri Champa tersebut kemudian dinikahi oleh Arya Dillah dan dari hasil pernikahan tersebut lahirlah Raden Kusen. Dengan demikian Raden Fatah dan Raden Kusen saudara satu ibu. Kedua saudara ini lahir dan dibesarkan di Palembang. Dalam masa pemerintahannya, Arya Damar bertindak sewenang-wenang sehingga diusir ke Jawa dan meninggal di Cirebon. Setelah itu, Palembang diperintah oleh seorang Dipati bernama Karangwidara yang masa pemerintahannya tidak diketahui angka tahunnya.

⁵³ Ravico. Konflik Elit Politik Di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821, *Tesis* (Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang, 2013), h.2.

Yang jelas, setelah kekuasaan Dipati Karangwidara, Palembang mengalami masa kekosongan kekuasaan.⁵⁴

Setelah Kerajaan Majapahit runtuh karena desakan-desakan kerajaan Islam, Sunan Ampel sebagai wakil Walisongo mengangkat Raden Fatah menjadi penguasa seluruh Jawa, menggantikan ayahnya, pusat kerajaan Jawa dipindahkan ke Demak. Kesultanan Demak mengalami masa-masa sulit ketika Raden Fatah wafat. Konflik elit bangsawan dalam perebutan kekuasaan terus terjadi, hingga Kerajaan Demak jatuh ke tangan Kerajaan Pajang.⁵⁵

b. Palembang di bawah kekuasaan Demak-Panjang.

Kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Fatah dalam perkembangannya penuh dengan konflik internal antar sesama keturunan Raden Fatah untuk memperebutkan kekuasaan sebagai Raja Demak. Perang saudara ini akhirnya dimenangkan oleh keluarga Sultan Trenggono yaitu pangeran Adiwijaya atau yang bernama Joko Tingkir. Dengan direbutnya kekuasaan Demak oleh Joko Tingkir, maka sejak itu daerah yang tadinya berada di bawah pengaruh Demak statusnya berubah menjadi daerah Pajang. Demikian juga dengan Palembang, daerah dan penguasanya otomatis tunduk dibawah Pajang.⁵⁶

⁵⁴ Muhammad Ilham. "Diplomasi Politik Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda Berdasarkan Surat-Surat Melayu Abad ke 19", *Tesis* (Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2015), h. 28.

⁵⁵ Ravico. Konflik Elit Politik Di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821, *Tesis* (Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang, 2013), h. 2

⁵⁶ Muhammad Ilham. "Diplomasi Politik Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda Berdasarkan Surat-Surat Melayu Abad ke 19", *Tesis*, h. 29.

Dari catatan sejarah tulisan tangan Arab yang dibuat oleh seorang priyayi di Palembang dapat dibaca sebagai berikut: Telah diriwayatkan bahwa telah berpindah beberapa anak raja-raja dari tanah Jawa ke negeri Palembang di karenakan Sultan Pajang menyerang Demak dan adalah yang bermula menjadi raja di Palembang ialah Kiyai Geding. Kiyai Geding Suro wafat kemudian digantikan oleh Kiyai Geding Suro Mudo anak Kiyai Geding Ilir dan ketika itu, anak-anak raja yang berpindah dari tanah Jawa ke negeri Palembang yaitu 24 orang. Beberapa orang keturunan Pangeran Trenggono yang hijrah ke Palembang di bawah pimpinan Kiyai Geding Suro Tuo yang menetap di perkampungan Kuto Gawang di daerah di sekitar kampung Palembang Lamo.⁵⁷

Penguasa Demak di Palembang yang pertama adalah Pangeran Sido Ing Lautan. Beliau ini wafat dilaut Jawa dalam pelayaran pulang ke Palembang sesudah mengantarkan upeti ke Demak. Pangeran Sido Ing Lautan ini keturunan dari Raden Fatah, berturut-turut melalui zuriatnya pangeran Trenggono, Sultan Prawoto, Penembahan Kediri, dan Pangeran Suroboyo. Dapat dimengerti, bahwa justru karena Pangeran Sido Ing Lautan adalah keturunan dari sultan-sultan Demak, maka beliau dijadikan Pangeran Demak di Palembang, dimana Raden Fatah dan dilahirkan dan dibesarkan. Ketika huru hara antara Demak dan Pajang sedang berkecamuk. Serombongan priyayi berjumlah 24 orang meninggalkan tanah Jawa. Kepala rombongan ini dikenal dengan sebutan Ki Gede Ing Suro Tuo. Beliau adalah putera

⁵⁷ R.H.M Akib, *Sejarah Palembang* (Palembang: Pidato Dies. APDN, 1969), h. 11.

dari Pangeran Sido Ing Lautan. Kemungkinan besar, bahwa rombongan Ki Gede Ing Suro Tuo tersebut ikut bersama Pangeran Sido Ing Lautan, tetapi yang disebut terakhir tidak sampai kembali ke Palembang karena wafat di Lautan.⁵⁸

Kemudian Ki Gede Ing Suro Mudo (1572-1589), tokoh ini memerintah Palembang selama 17 Tahun. Diperkirakan pada masa Ki Gede Ing Suro Mudo inilah dibangun kompleks pemakaman di Gedingsuro. Berdasarkan tinggalan arkeologisnya, diketahui bahwa kompleks pemakaman Gedingsuro didirikan diatas susunan Candi Hindu-Budha. Komplek pemakaman ini terbuat dari kayu dan bata. Terlepas dari proses perpindahan kekuasaan di Palembang dari orang Cina ke orang Jawa (Ki Gede Ing Suro), yang jelas dari bukti arkeologis diketahui bahwa salah satu pembesar agama pada waktu itu juga orang Cina. Bukti tersebut berupa makam Tan Pualang Chiang Ching, seorang Cina yang diangkat anak oleh Ki Gede Ing Suro Mudo dan setelah masuk Islam kepandainnya dalam bidang agama kemudian diangkat dan menjadi imam Kerajaan Palembang. Setelah itu kekuasaan berpindah ke tangan Pangeran Ki Mas Adipati (1589-1594) anak Ki Gede Ing Suro Ilir sehingga lama kekuasaannya hanya 5 Tahun.⁵⁹ Namun Kerajaan Pajang tidak berusia lama. Dari Pajang kelak lahir Kerajaan Islam Mataram, dan Kerajaan Palembang menjadi wilayah protektorat (daerah pelindung) dari Kerajaan Mataram, kemudian Kerajaan Palembang di bawah pengaruh kekuasaan Mataram.

⁵⁸ Muhammad Ilham. “Diplomasi Politik Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda Berdasarkan Surat-Surat Melayu Abad ke 19”, *Tesis* (Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2015), h. 29.

⁵⁹ Muhammad Ilham. “Diplomasi Politik Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda Berdasarkan Surat-Surat Melayu Abad ke 19”, *Tesis*, h. 29-30.

c. Palembang di bawah kekuasaan Mataram

Pangeran Madi Ing Angsoko adalah penguasa pertama Palembang ketika Palembang tunduk dibawah Mataram. Pada masa pemerintahannya mulai dirintis hubungan dengan Belanda (VOC) di Batavia tahun 1617 inilah untuk pertama kalinya Palembang mengadakan hubungan langsung dengan Belanda. Pembukaan hubungan dagang ini memungkinkan semakin ramainya perdagangan dan pelayaran di kawasan Selat Malaka. Selain itu, pada masa Pangeran Madi Ing Angsoko pula terjadi penyerbuan pasukan Banten yang dipimpin langsung oleh Sultan Maulana Muhammad. Penyerbuan ini disebabkan Banten ingin menguasai Palembang. Serangan ini mengalami kegagalan dan bahkan Sultan Maulana Muhammad sendiri gugur dalam pertempuran.⁶⁰

Masa kekuasaan Pangeran Madi Ing Angsoko tergolong lama yaitu sekitar 33 tahun. Setelah Pangeran Madi Ing Angsoko meninggal. Di Palembang terjadi perebutan kekuasaan antara menantunya (Pangeran Jambi) dan saudara Pangeran Madi Ing Angsoko yaitu Pangeran Madi Alit. Perebutan kekuasaan ini dimenangkan oleh Pangeran Madi Alit, kekuasaan dipegang oleh Pangeran Sido Ing Puro yang dikenal nama Raden Aria (1630-1639). Setelah berkuasa selama 9 tahun kedudukannya digantikan oleh saudaranya yang bernama Pangeran Sido Ing Kenayan (1639-1650). Pangeran Sido Ing Kenayan mempunyai Istri yang bernama Ratu Sinuhun Putri Ki Pancanegara Sumedang. Hal terpenting yang dilakukan oleh

⁶⁰ Muhammad Ilham. "Diplomasi Politik Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda Berdasarkan Surat-Surat Melayu Abad ke 19", *Tesis*, h. 30.

Pangeran Sido Ing Kenayan adalah menjaga stabilitas keamanan Palembang, sementara itu untuk mengatur daerah yang di luar Palembang, maka dikeluarkanlah Undang-undang Simbur Cahaya, yang diyakini sebagai hasil kerja Ratu Sinuhun. Selain itu juga dicapai kesepakatan yang memperbolehkan Belanda untuk mendirikan kantor dagang di Palembang. Tahun 1650 Pangeran Sido Ing Kenayan meninggal kedudukannya digantikan oleh Pangeran Sido Ing Pasarean (Saudra dari Ratu Sinuhun) yang berkuasa hanya 1 tahun. Kedudukan penguasa Palembang selanjutnya jatuh ke tangan anaknya Pangeran Sido Ing Rajek (1652-1659). Pada masa pemerintahannya, Belanda menempatkan Antonij Boeij sebagai wakil dagang VOC di Palembang. Namun tindak tanduknya yang tidak menyenangkan Palembang, antara lain merampas sebuah kapal Cina bermuatan lada akhirnya ia ditarik ke Batavia.⁶¹

Penguasa Palembang menyadari bahwa akibat tindakan perlawanan ini akan menimbulkan masalah dikemudian hari dan akan memancing konflik terbuka dengan Belanda. Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya serangan Belanda, maka penguasa Palembang mengirimkan utusan ke Mataram namun rupanya penguasa Mataram tidaklah memberikan respon yang positif, bahkan ada kecenderungan untuk memihak kepada Belanda. Belanda mendarat dengan seluruh pasukan dan dengan berani bergerak masuk di Kerajaan Palembang. Belanda melemparkan granat ke arah kota yang menyebabkan rumah-rumah yang berdempetan terbakar, rakyat Palembang menjadi ketakutan dan meninggalkan pemukiman mereka. Hal ini di dimanfaatkan oleh

⁶¹ Muhammad Ilham. "Diplomasi Politik Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda Berdasarkan Surat-Surat Melayu Abad ke 19", *Tesis*, h. 31.

Laksamana Van Der Laen, Mr. Truysman dan Kapten Harman untuk menerobos pertahanan kota lewat tiga jalur berbeda. Di sana mereka mendapat perlawanan sengit dari penduduk lokal yang sesuai dengan tradisi setempat “amuk” menyerang Belanda dengan gagah berani. Penduduk lokal berhasil membunuh 18 orang pasukan Belanda, diantaranya adalah seorang letnan, seorang letnan muda, dan seorang sersan, tetapi penduduk Palembang tidak mengalami banyak kehilangan.⁶²

Pada 27 November 1659, semua rumah yang masih berdiri tegak di sekitar Benteng Mansapura dibakar, beserta benteng itu sendiri atas perintah khusus dari laksamana. Pada hari yang sama juga pihak Belanda mengangkut sejumlah besar peralatan militer keluar dari rawa-rawa Pulau Kemarao. Belanda sadar bahwa Pangeran Palembang tidak akan mengirimkan perwakilan ataupun memberikan jawaban atas surat balasan yang dikirimkan oleh Belanda pada tanggal 20 November 1659, entah karena keras kepala atau memang sudah putus asa, sehingga pihak Belanda memutuskan untuk meninggalkan Palembang. Pangeran Sido Ing Rajek memimpin perlawanan bersama rakyat Palembang. Beberapa benteng pertahanan Belanda di sekitar Plaju dan Pulau Kemaro dapat direbut Belanda. Keraton Kuto Gawang yang menjadi pusat pemerintahan Palembang berhasil dihancurkan oleh Belanda dan Pangeran Sido Ing Rajek menyingkir ke Dusun Sakatiga dan meninggal disana.⁶³

⁶² Muhammad Ilham. “Diplomasi Politik Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda Berdasarkan Surat-Surat Melayu Abad ke 19”, *Tesis*, h. 33.

⁶³ Muhammad Ilham. “Diplomasi Politik Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda Berdasarkan Surat-Surat Melayu Abad ke 19”, *Tesis*, h. 34-35.

d. Palembang menjadi Kesultanan Palembang

Untuk mencari pengganti Pangeran Sido Ing Rajek, maka dilakukanlah perundingan di lingkungan keluarga istana dan pihak Belanda. Keputusan yang di ambil adalah mempercayakan penerus Pangeran Sido Ing Rajek pada adiknya yang bernama Ki Mas Hindi. Pada mulanya Belanda menolak menempatkan Ki Mas Hindi, karena khawatir akan bersikap tidak bersahabat dengan Belanda, namun atas desakan penguasa Jambi yang kebutulan saat itu mempunyai hubungan yang baik, pihak Belanda dapat menerima Ki Mas Hindi sebagai penguasa Palembang.⁶⁴

Pangeran Ario Kesumo adalah Sultan Palembang Pertama dengan gelar Sultan Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayyidul Imam.⁶⁵ Pada tahun 1675, Ki Mas Hindi memakai gelar Sultan. Pemakaian gelar ini adalah untuk pertama kalinya bagi penguasa Palembang, karena sebelumnya penguasa Palembang hanya memakai gelar Pangeran atau Kiyai. Pemakaian gelar ini secara politis menunjukkan bahwa status Ki Mas Hindi setara dengan penguasa Mataram yakni sebagai Raja, dan sekaligus sebagai pernyataan bahwa Palembang berdiri sebagai sebuah Kesultanan yang merdeka yang lepas dari penguasa Mataram. Adapun gelar yang dipakai Ki Mas Hindi adalah Pangeran Ario Kesumo Abdurrohim Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayyidatul Imam. Dalam rangka menegakkan kembali eksistensi Palembang, maka Sultan Abdurrahman sebagai penguasa baru, memindahkan pusat

⁶⁴ Muhammad Ilham. “Diplomasi Politik Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda Berdasarkan Surat-Surat Melayu Abad ke 19”, *Tesis* (Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2015), h. 35.

⁶⁵ R.H.M Akib, *Sejarah Palembang* (Palembang: Pidato Dies. APDN, 1969), h. 3.

pemerintahan dari Keraton Kuto Gawang ke Keraton Beringinjanggut. Pada tahun 1662 Sultan Abdurrahman mengikat perjanjian dengan Belanda. Perjanjian itu tidak hanya terbatas pada urusan dagang, tetapi juga meningkat kearah usaha-usaha untuk menguasai dan memonopoli semua hasil bumi di Kesultanan Palembang. Sisi lain perjanjian itu pula menunjukkan penguasa Palembang mempunyai wewenang untuk mengatur negerinya sendiri lepas dari Mataram.⁶⁶

Pada masa Sultan Abdurrahman, hubungan dengan Jambi berlangsung sangat baik yang dibuktikan dengan adanya pengiriman pasukan bantuan dari Palembang, yang di minta oleh penguasa Jambi untuk menumpas pemberontakan di daerah Jambi Hulu tahun 1700. Pasukan Palembang dipimpin oleh anak kedua sultan yaitu Raden Ario sukses dalam menumpas pemberontakan tersebut. Kesuksesan itu menjadikan hubungan antara Palembang-Jambi semakin baik. Sebagai jasanya pangeran Dipo Anom (Penguasa Jambi) menikahkan putrinya yang bernama Nyi Mas Ratu Senguk dengan Raden Ario dengan gelar Senopati Jayo Ing Lago. Seorang saudara perempuan sultan juga dinikahkan dengan Ario Pulang Jiwa dari pakuan Banten sedangkan sultan sendiri telah menikah dengan puteri Banten. Hal ini membawa hikmanya, bahwa pulau Bangka dan Belitung beserta pulau-pulaunya disekitarnya masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Palembang pada tahun 1666.⁶⁷

⁶⁶ Muhammad Ilham. "Diplomasi Politik Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda Berdasarkan Surat-Surat Melayu Abad ke 19", *Tesis* (Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, 2015), h. 36.

⁶⁷ Muhammad Ilham. "Diplomasi Politik Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda Berdasarkan Surat-Surat Melayu Abad ke 19", *Tesis*, h. 36.

Di sinilah fondasi awal kebangkitan Kesultanan Palembang Darussalam. Fondasi Kesultanan Palembang Darussalam terus dibangun hingga Sultan Mansyur Jayo Ing Lago (1706-1714), dan Sultan Agung Komaruddin Sri Truno (1714-1724). Pada masa ini, oleh beberapa penulis sejarah Kesultanan Palembang merupakan masa pertengahan. Bangkitnya pembangunan secara nyata dan membawa kepada kemakmuran rakyat terjadi pada masa Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo atau lebih dikenal SMB I (1724-1758). Pada masanya dibangun Masjid Agung, Makam Lemabang, dan Kuto Tengkuruk, ia juga membangun Keraton Kuto Besak, sehingga ia lebih dikenal dengan “Bapak Pembangunan”. Keberhasilannya kemudian dilanjutkan oleh Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kusumo (1758-1776).⁶⁸

Pemerintahan Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kusumo, tidak mengalami perubahan yang besar, ia hanya melanjutkan keberhasilan Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo hingga akhir hayatnya. Setelah ia wafat, kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam dipimpin oleh Sultan Muhammad Bahauddin (1776-1803). Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Bahauddin, terjadi perubahan ekonomi dan budaya, sehingga kemakmuran rakyat dapat dirasakan. Di bidang budaya, Palembang menjadi pusat Syi’ar agama Islam di kawasan belahan Barat Nusantara. Wafatnya Sultan Muhammad Bahauddin, Kesultanan Palembang dipimpin oleh Raden Muhammad Hasan Pangeran Ratu dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin II. Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan sultan terakhir Kesultanan

⁶⁸ Ravico. Konflik Elit Politik Di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821, *Tesis* (Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang, 2013), h. 44.

Palembang Darussalam. Hingga akhir hayatnya, Sultan Badaruddin II mendapatkan anugerah sebagai pahlawan Nasional dari Pemerintahan RI pada Tahun 1984.⁶⁹

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II ini terjadi peperangan antara Kesultanan Palembang dengan Inggris. Setelah tahun 1816, Inggris meninggalkan Nusantara, maka Kesultanan Palembang kembali berperang dengan Belanda. Perang dengan Belanda terjadi pada tahun 1819-1821. Dalam perang ini, Sultan Mahmud Badaruddin II beserta keluarganya dapat ditangkap oleh Belanda. Sultan beserta keluarganya meninggal dalam pembuangan di Ternate, Maluku Utara. Setelah Sultan Mahmud Badaruddin II ditangkap oleh Belanda, perang dilanjutkan oleh Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom beserta rakyat Palembang. Akhirnya Kesultanan Palembang dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1825.⁷⁰

⁶⁹ Ravico. Konflik Elit Politik Di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821, *Tesis*, h. 44-45.

⁷⁰ Darmawijaya, *Kesultanan Islam Nusantara* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2010), h. 57-59.



UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

BAB III

BIOGRAFI TOKOH

Setelah Sultan Mahmud Badaruddin II ditangkap oleh Belanda, perang dilanjutkan oleh Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom beserta rakyat Palembang. Dan akhirnya Kesultanan Palembang Darussalam dihapuskan oleh Belanda pada tahun 1825.⁷¹ Kebesaran Kesultanan Palembang Darussalam di masa silam membuat beberapa pihak berupaya untuk membangkitkannya kembali. Sejak hilangnya Kesultanan Palembang Darussalam, maka kebudayaan, adat istiadat masyarakat Palembang mengalami kemunduran dan kini diusahakan untuk dibangun kembali dengan kemunculan dua tokoh yang merasa sebagai pewaris tahta kesultanan di Kesultanan Palembang Darussalam. Berikut ini biografi kedua tokoh Kesultanan Palembang Darussalam sebagai berikut.

A. Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H



Nama lengkapnya Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H bin Raden H. Abdul Hamid Prabudiradja IV. Lahir di Palembang 28 Januari 1950.⁷² Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H. bin Raden H. Abdul Hamid Prabudiradja IV adalah seorang pensiunan anggota Polri yang bertugas di Kepolisian Daerah Sumatra Selatan,

⁷¹ Darmawijaya, *Kesultanan Islam Nusantara* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2010), h.59.

⁷² Wawancara Pribadi dengan R.M Fauwaz Diradja. Palembang, 19 September 2017.

dengan pangkat terakhir komisaris besar polisi. Almarhum bertugas terakhir sebagai Kepala Biro Binamitra Polda Sumatera Selatan. Setelah Pensiun pada tahun 2009, Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H. bin Raden H. Abdul Hamid Prabudiradja IV menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014.⁷³

Pada tanggal 3 Maret 2003, bertempat di Masjid Lawang Kidul, Majelis Musyawarah Adat Kesultanan Palembang Darussalam menobatkan Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H. bin Raden H. Abdul Hamid Prabudiradja IV sebagai sultan di Kesultanan Palembang Darussalam dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja (Sultan Mahmud Badaruddin III). Pengukuhan Sultan Palembang Darussalam dilakukan melalui Musyawarah para tokoh, Ulama, Sesepuh, berserta para zuriat dari Sultan Palembang Darussalam (antara lain dari zuriat Pangeran Prabu Diradjah Haji Abdullah bin Sultan Mahmud Badarudin II, Pangeran Rabu Diwongso Muhammad Zen bin Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin) yang umumnya mereka tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan mereka telah mendapat petunjuk dari Allah SWT, dengan melalui proses dan menghasilkan suatu keputusan.⁷⁴ Alumni Akabri Kepolisian angkatan 1974 ini kemudian menerima jabatannya sebagai sultan. Tugasnya sebagai sultan dilaksanakannya di sela-sela tugasnya sebagai Karo Binamitra Polda Sumsel.⁷⁵

⁷³ Data diperoleh dari, keraton Kesultanan Palembang Darussalam SMB III Prabu Diradja. Palembang, 19 September 2017.

⁷⁴ Wawancara Pribadi dengan R.M Fauwaz Diradja. Palembang, 19 September 2017.

⁷⁵ Wawancara Pribadi dengan Pangeran Nato Rasyid, Palembang, 19 September 2017.

Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H. bin Raden H. Abdul Hamid Prabudiradja IV merupakan Alumnus SDN 23 Palembang, SMPN 1 Palembang, dan SMAN 2 Palembang. Sultan Prabu Diradja mempunyai satu istri dan 4 orang anak, yakni Raden Ayu Ulya Diradja (lahir di Batusangkar, wafat di Bandung, dimakamkan di Sumedang), Raden Ayu Ratih Rania Kerama Diradja, Raden Ayu Ratna Mutia Kerama Diradja, dan Raden Muhammad Fauwaz Diradja.⁷⁶

Dimana visi yang di emban oleh Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja adalah mewujudkan Negeri Palembang Darussalam, menjadi Negeri tempat keselamatan yang di ridhoi Allah SWT, melalui adat istiadat Kesultanan Palembang Darussalam yang telah dilupakan dan di tinggalkan.⁷⁷

Selain itu, Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H. bin Raden H. Abdul Hamid Prabudiradja IV atau Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja juga mengusulkan kepada Pemerintah Republik Indonesia tentang gambar Sultan Mahmud Badaruddin II dimata uang RI.⁷⁸ Melalui menteri Keuangan RI dengan surat nomor: SP/032/XI/2001 tanggal 6-11-2001 tentang gambar Sultan Mahmud Badaruddin II dimata uang RI dan mendapat persetujuan atas usulan nomor: 4/132/DPU Januari 2002 tentang penempatan gambar Sultan Mahmud Badaruddin II di mata uang RP 10.000 emisi tahun 2005 sampai dengan sekarang.⁷⁹

⁷⁶ Wawancara Pribadi dengan R.M Fauwaz Diradja. Palembang, 19 September 2017.

⁷⁷ Data diperoleh dari, keraton Kesultanan Palembang Darussalam SMB III Prabu Diradja. Palembang, 19 September 2017.

⁷⁸ Wawancara Pribadi dengan R.M Fauwaz Diradja. Palembang, 19 September 2017.

⁷⁹ Data diperoleh dari, keraton Kesultanan Palembang Darussalam SMB III Prabu Diradja. Palembang, 19 September 2017.

Ada dua alasan yang mendasari pengangkatan Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H. Pertama, “Saya Menerima Wangsit”,⁸⁰ Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H mengaku menjadi Sultan Mahmud Badaruddin III karena menerima wangsit.

Kedua, menurut silsilah Kesultanan Palembang Darussalam, Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H. bin Raden H. Abdul Hamid Prabudiradja IV merupakan keturunan ke-11 dari Sultan Abdurrahman. Sehingga jika dirunut secara garis keturunan, dia adalah putera dari Raden H. Abdul Hamid Prabu Diradjah IV, bin R.H. Syarif Prabu Diradjah III, bin R. H. Abdul Habib Prabu Diradjah II, bin Pangeran Prabu Diradjah Haji Abdullah, bin Sultan Mahmud Badaruddin Khalifatul Mukminin Sayidul Iman (Sultan Badaruddin II), bin Sultan Muhammad Bahauddin, bin Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo, bin Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (Sultan Badaruddin I), bin Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago, bin Sultan Abdurrahman Kholifatul Mukminin Sayidul Iman (Kiai Mas Endi Pangeran Ario Kusumo).⁸¹

Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H. bin Raden H. Abdul Hamid Prabudiradja IV atau Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja meninggal Dunia Usia 67 Tahun. Sultan Prabu Diradja menghembuskan nafas terakhir hari Kamis tanggal, 07 September 2017 di Rumah Sakit RK Charitas Palembang, Sumatera Selatan. Sultan meninggal setelah 14 Tahun menjabat di Kesultanan Palembang

⁸⁰ Palembang Ekspres “Prabu Diradja “Sultan Mahmud Badaruddin III” blak-blakan soal Kesultanan Palembang Darussalam – Saya Menerima Wangsit,” Palembang, 11 Maret 2003, h. 21.

⁸¹ Wawancara Pribadi dengan R.M Fauwaz Diradja, Palembang, 19 September 2017.

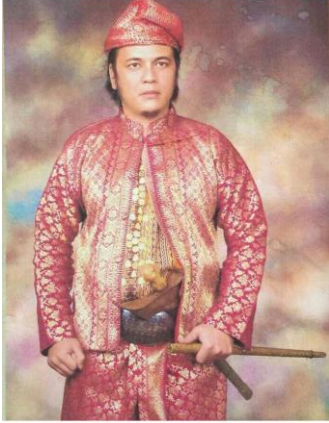
Darussalam. Jenazah Sultan dishalatkan di Masjid Agung Palembang. Keluarga kesultanan memutuskan memakamkan di kompleks Pemakaman Raja-Raja Palembang Kawah Tekurep selepas shalat Jum'at. Sebelumnya Sultan Prabu Diradja tampak segar saat menghadiri Haul Ki HA Malik Tadjuddin ke-17 dan peresmian laboratorium computer SMP/SMA NU Palembang. Karakter Sultan Prabu Diradja Pendiam, namun sultan selalu konsisten dalam menyikapi suatu masalah apapun tentang budaya dan sejarah bangsa, terutama mengenai sejarah Kesultanan Palembang Darussalam.⁸²

Setelah Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Diradja, S.H atau Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja meninggal dunia, tahta kepemimpinan Kesultanan Palembang Darussalam diambil alih oleh anaknya yakni Raden Muhammad Fauwaz Diradja. Pewarisan tahta kesultanan tersebut telah berlangsung tujuh tahun silam atau tahun 2010. Raden yang kini bergelar Sultan Mahmud Badaruddin IV Jaya Wikrama mengatakan, prosesi penyerahan tahta itu dilakukan saat dirinya masih berusia 28 Tahun. Hanya saja, jabatan itu belum berlaku karena ayahnya masih hidup. Menurutnya, semasa hidup SMB III Prabu Diradja berwasiat untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Palembang yang mulai terkikis oleh zaman. Termasuk juga menjaga aset-aset Kesultanan Palembang Darussalam sebagaimana pesan yang disampaikan majelis adat.⁸³

⁸² Data diperoleh dari, keraton Kesultanan Palembang Darussalam SMB III Prabu Diradja. Palembang, 19 September 2017.

⁸³ Wawancara Pribadi dengan R.M Fauwaz Diradja, Palembang, 19 September 2017.

B. Ir. H Raden Mahmud Badaruddin



Nama lengkapnya yaitu Ir. H Raden Mahmud Badaruddin. Lahir di Palembang, 23 Februari 1966. Beliau adalah Ketua Umum Himpunan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam yang dilantik pada tanggal 19 November 2006 di halaman dalam Benteng Kuto Besak.⁸⁴ Di mana visi yang di emban adalah untuk menghimpun kembali para keturunan/zuriat para raja atau sultan yang pernah berkuasa di Palembang yang tersebar di seluruh Nusantara.⁸⁵

Di dalam mengemban amanah tersebut, beberapa agenda kerja sosial dan budaya telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, seperti perbaikan makam para Sultan Palembang Darussalam, memberikan penghargaan kepada masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan yang berprestasi, serta melacak, mengumpulkan, dan memverifikasi bukti-bukti sejarah Kesultanan Palembang.⁸⁶

Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin mempunyai satu istri yakni Ratu Anita Soviah yang mempunyai butik pakaian hasil rancangan sendiri dan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin mempunyai 4 orang anak, yakni RM Arga Bayu, RA Siti Delima Ananda Putri, RA Sahidah Damara Vanesia, dan RM Galih Rio Purboyo.⁸⁷

⁸⁴ Wawancara Pribadi dengan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, Palembang, 02 juni 2017.

⁸⁵ Data diperoleh dari, keraton Kesultanan Palembang Darussalam Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Palembang, 02 juni 2017.

⁸⁶ Wawancara Pribadi dengan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, Palembang, 02 juni 2017.

⁸⁷ Wawancara Pribadi dengan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, Palembang, 02 juni 2017.

Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin memilih sebagai pengusaha ketimbang profesi lain. Beliau adalah direktur utama tiga perusahaan: PT Kelantan Sakti, PT Adi Pratama, dan PT Gerindro Utama Mandiri. Selain itu, dia menjadi komisaris di PT Mercury Pratama. Selain memimpin perusahaan, dalam keseharian Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin disibukkan dengan menjadi narasumber seminar, mulai pendidikan, membedah buku, hingga mengupas sejarah kerajaan Palembang Darussalam. Dia juga rajin berkunjung ke daerah dalam upaya meningkatkan ekonomi para petani.⁸⁸

Meski keturunan raja, kehidupan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin di masa muda sempat menjadi pengamen, berkeliling dari satu kafe ke kafe lain untuk membiayai kuliahnya di Fakultas Pertanian Jurusan Agronomi di UMP (Universitas Muhammadiyah Palembang) pada tahun 1989. Dari hasil mengamennya itu, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin berhasil membiayai kehidupannya sendiri. Menurut Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, darah seni yang mengalir dalam dirinya menyebabkan dia terobsesi untuk terus melestarikan budaya dan adat istiadat Kesultanan Palembang.⁸⁹

Pada tanggal 18 November 2006, para zuriat (keturunan) sepuluh sultan yang pernah berkuasa di Palembang beserta zuriat Melayu di Sumatra Selatan melakukan musyawarah yang akhirnya mengukuhkan Ir. H Raden Mahmud Badaruddin sebagai Sultan Palembang Darussalam dengan gelar Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin.

⁸⁸ Wawancara Pribadi dengan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, Palembang, 02 juni 2017.

⁸⁹ Kick Andy. *Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin* (Video), 26 Januari 2015.

Pelantikannya dilakukan pada tanggal 19 Desember 2006 di halaman dalam Benteng Kuto Besak.⁹⁰

Berdasarkan silsilah Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin adalah keturunan dari tiga sultan yang pernah berkuasa di Palembang. Pertama dari pendiri keraton Kesultanan Palembang Darussalam, Sultan/Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam. Kedua Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago, sultan ini memiliki Putra Mahkota Pangeran Ratu Purboyo yang tewas dizolimi diracun pada fajar hari menjelang penobatannya. Ketiga, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin juga memiliki garis keturunan dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo saudara lain ibu Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago dimana Raden Lumbu Pangeran Nato Dirajo Bin Pangeran Ratu Purboyo Bin Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago menikah dengan anak Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo.⁹¹

Pengukuhan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin sebagai Sultan Palembang Darussalam direstui oleh ahli nasab Kesultanan Palembang Darussalam, yakni RM Yusuf Prabu Tenaya yang merupakan zuriat dari Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu bin Sultan Mahmud Badaruddin II serta dari zuriat sultan terakhir Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom Sultan terakhir yang dibuang oleh Belanda ke Menado Tua dan sampai sekarang makam sultan tersebut belum ditemukan. Alasan penobatan Ir. H Raden Mahmud Badaruddin sebagai sultan di Kesultanan Palembang Darussalam, menurutnya adanya musyawarah mufakat antara zuriat

⁹⁰ Data diperoleh dari, keraton Kesultanan Palembang Darussalam Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Palembang, 02 juni 2017.

⁹¹ Wawancara Pribadi dengan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, Palembang, 02 juni 2017.

Kesultanan Palembang se-Nusantara dikarenakan sultan terdahulu tidak meninggalkan wasiat dan dalam silsilah Kesultanan Palembang Darussalam Raden Iskandar Mahmud Badaruddin merupakan keturunan dari tiga sultan yang pernah berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam, yaitu Sultan/Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam, Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago dan Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo. Jadi, saya bukan diangkat berdasarkan wasiat.⁹²

⁹² Wawancara Pribadi dengan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, Palembang, 02 juni 2017.



UIN

**RADEN FATAH
PALEMBANG**

BAB IV

KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM PADA MASA 2003-2006

A. Pengantar

Palembang mendapat banyak julukan atas keberhasilan pembangunan politik, ekonomi dan sosialnya. Bagaikan pusat perdagangan di Eropa, yaitu Venesia, maka Palembang diberi julukan *het Indische Venetie*, bahkan nama Darussalam diterjemahkan sebagai *de Stad des Vredes*, tempat yang tentram. Nama Darussalam adalah nama resmi Kesultanan Palembang.⁹³ Kajian tentang wilayah Sumatera Selatan merupakan kajian yang sangat subur terutama dalam ranah kajian sejarah, khususnya di era Kedatuan/Kerajaan Sriwijaya maupun era Kesultanan Palembang Darussalam dan pemerintahan kolonial Belanda. Maraknya kajian ini tidak dapat dilepaskan dari peran penting Sumatera Selatan dalam sistem perdagangan dunia seiring dengan peran penting Kedatuan/Kerajaan Sriwijaya.⁹⁴ Seiring dengan perkembangan zaman dan sejak dihapuskannya Kesultanan Palembang Darussalam oleh kolonial Belanda, ada beberapa elit lokal yang berupaya untuk membangkitkan Kesultanan Palembang Darussalam.

Dari data sejarah, para raja dan sultan yang pernah memerintah di Palembang Darussalam dapat diketahui bahwa tidak ada aturan dan hukum yang baku tentang proses penggantian atau pewarisan tahta pada masa Kerajaan Palembang dan

⁹³ Djohan Hanafiah, *Perang Palembang Melawan V.O.C* (Palembang: Karyasari, 1996), h. 48.

⁹⁴ Kristantina Indriastuti, Dkk., *Peradaban Masa Lalu Sumatera Selatan* (Palembang: Balai Arkeologi Sumatera Selatan, 2016), h. 141.

Kesultanan Palembang Darussalam.⁹⁵ Kondisi seperti ini rawan terjadinya konflik, karena masing-masing tokoh merasa berhak atas tahta kesultanan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika terlihat adanya ketidakaturan garis keturunan di Kesultanan Palembang dalam hal pewarisan kekuasaan. Hal inilah yang mendasari atau memacu terjadinya konflik di antara keturunan Kesultanan Palembang Darussalam yang mengakibatkan Kesultanan Palembang Darussalam mempunyai dualisme kesultanan.

B. Upaya Kebangkitan Kesultanan Palembang Darussalam

Kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam merupakan salah satu bentuk pemerintahan kesultanan Islam Melayu dengan ciri mendasar diangkatnya para raja/sultan di tanah melayu berdasarkan syariat Islam. Sistem politik Melayu Islam raja juga adalah sumber dan pusat kekuasaan. Raja adalah penyusun adat istiadat, pemilik kerajaan dan berdiri teguh mempertahankan kedaulatan negara Islam dalam sebuah masyarakat yang bahagia serta mengamalkan undang-undang syariat Islam. Legalitas raja adalah restu dari pada kewenangan yang dimiliki oleh raja tersebut. Kewenangannya tersebut disalurkan untuk menggerakkan sumber-sumber kekuasaan yang dia miliki.⁹⁶ Kaitannya pada penelitian ini dapat dilihat bahwa legalitas kekuasaan raja dalam sistem Islam Melayu itu harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

⁹⁵ Susi Herti Afriani, Dkk., *Sistem Kekerabatan Marga dan Pengaruhnya dalam Proses Pembentukan Struktur Politik di Sumatera Selatan* (Palembang: NoerFikri Offset bekerja sama dengan Fakultas Adab dan Humaniorah UIN Raden Fatah, 2016), h. 75.

⁹⁶ Eka Martini. *Dualisme Kepemimpinan Kesultanan Palembang Darussalam*, Tesis (Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang, 2008), h. 127.

Melihat perkembangan yang terjadi di Negeri Palembang Darussalam ini yang kian lama akan menuju kehancuran dan perpecahan, khususnya dalam masalah adat istiadat, tata kerama, sopan santun, maka beberapa tokoh-tokoh ulama dari beberapa daerah (ulama dari Palembang, ulama dari Bangka, dan ulama dari Kalimantan) beserta para zuriat / kerabat Kesultanan Palembang Darussalam yang berada di Palembang Darussalam (antara lain zuriat Pangeran Prabu Diradja Haji Abdullah, Pangeran Prabu Diwongso Muhammad Zen bin Susuhunan Ratu Mahmud Badaruddin), dan pada umumnya ulama-ulama tersebut belum begitu banyak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi telah mendapat petunjuk dari Allah SWT mengadakan musyawarah. Mereka mengadakan musyawarah untuk mencegah perpecahan, mencegah sifat adu domba, hasut menghasut, iri hati dan dengki serta berusaha supaya Negeri Palembang ini dapat memenuhi harapan dari sultan-sultan Palembang Darussalam terdahulu.⁹⁷

Untuk mengingatkan kembali keberadaan Kesultanan Palembang Darussalam di Nusantara pada masa lalu,⁹⁸ maka melalui musyawarah para tokoh-tokoh ulama yang pada umumnya para ulama-ulama tersebut belum dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, beserta para zuriat/kerabat Kesultanan Palembang Darussalam menghasilkan suatu keputusan. Melalui proses yang sangat panjang menghasilkan suatu keputusan atau keinginan bahwa Kesultanan Palembang Darussalam itu harus dibangkitkan kembali.

⁹⁷ SMB III Prabu Diradja, *Kesultanan Palembang Darussalam* (Palembang: Palembang Darussalam, 2009), h. 28.

⁹⁸ SMB III Prabu Diradja, h. 2.

Niat yang tulus dan ikhlas untuk menuju Palembang Darussalam yang merupakan negeri tempat keselamatan, maka disusunlah beberapa kegiatan-kegiatan untuk menggugah sesepuh dan tetuo masyarakat Negeri Palembang Darussalam (dari guguk Raden, Masagus, Kemas, Kiagus, dan tokoh-tokoh masyarakat serta anak Negeri Palembang Darussalam)⁹⁹ maka disusunlah agenda kegiatan dalam upaya membicarakan Kesultanan Palembang Darussalam.

Berdasarkan hasil musyawarah adat sesepuh dan tetuo Palembang Darussalam menyusun persyaratan-persyaratan untuk menjadi sultan yaitu: pertama, beragama Islam. kedua, dari zuriat kesultanan Palembang Darussalam (diutamakan dari zuriat Sultan Mahmud Badaruddin II). ketiga, mempunyai bukti amanah (berupa benda-benda peninggalan dari sultan-sultan Palembang). keempat, dikenal oleh masyarakat Palembang dan kesultanan lainnya. kelima, dapat mendorong semangat kesatuan dan persatuan masyarakat Palembang. keenam, peduli terhadap peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. ketujuh, tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap pengerusakan atau penjualan aset-aset peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. kedelapan, berani berkorban untuk kemajuan dan kebanggaan zuriat. kesembilan, bertempat tinggal di Palembang. kesepuluh, berpendidikan yang tinggi minimal SMA. kesebelas, berpengalaman dalam berorganisasi.¹⁰⁰ Persyaratan-persyaratan inilah yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi sultan di Kesultanan Palembang Darussalam.

⁹⁹ SMB III Prabu Diradja, *Kesultanan Palembang Darussalam* (Palembang: Palembang Darussalam, 2009), h. 28.

¹⁰⁰ SMB III Prabu Diradja, h. 28-29.

Kemudian, “*dipilih tujuh orang dari anggota Majelis Adat Kesultanan Palembang Darussalam (terkenal dengan sebutan Tim 7)*”¹⁰¹ yang mendapat tugas dan bertanggung jawab untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang sultan serta menyiapkan dan melaksanakan profesi pengangkatan sultan.

Pada waktu dan tempat yang sama Prof. Dr. Jalalluddin dan Prof. Dr. Wardini (alm) yang saat itu menjadi ketua dan wakil ketua dalam pelaksanaan diskusi langsung membentuk majelis Adat Kesultanan Palembang Darussalam. Semua anggota diskusi yang setuju dihidupkannya kembali Kesultanan Palembang Darussalam terdaftar dalam anggota Majelis Adat ini. Tim 7 ini terdiri dari:

1. Ustadz Ahmad Umar Tyoyib (Alm)
2. Ir, Shulhan Malik Tadjuddin (Beliau adalah anak dari KIAI Malik Tadjuddin)
3. Ustadz Kgs. Mustofa Azhari
4. Ustadz Abdullah Ahmad (Dari Jebus Bangka)
5. Kgs. Ali Akbar Mutaqien
6. Drs. Abdul Hakim Husin
7. Syarifuddin, A.Md.¹⁰²

Dari hasil penelitian dan penilaian yang telah disusun oleh Majelis Musyawarah Adat Palembang Darussalam (Sekarang telah ditingkatkan menjadi Majelis Musyawarah Adat Kesultanan Palembang Darussalam). Beberapa orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat penting, antara lain: Djohan Hanafiah, RA

¹⁰¹ Wawancara Pribadi dengan Ustad Andi Syarifuddin, Palembang, 28 Mei 2017.

¹⁰² Eka Martini. Dualisme Kepemimpinan Kesultanan Palembang Darussalam, *Tesis* (Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang, 2013), h. 126.

Rahman Zeth, RM Mansyur Yan, RM Sjafei Prabu Diradja.¹⁰³ Berdasarkan hasil penelitian dari tim majelis musyawarah adat Kesultanan Palembang Darussalam yang memenuhi persyaratan tersebut adalah: Drs Raden Muhammad Sjafei Prabu Diradja SH bin Raden Haji Abdul Hamid (Prabu Diradjah IV).

Pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2003 M, Pkl: 10:00 Wib di Masjid Lawang kidul Palembang, dikukuhkan Drs. Raden Muhammad Sjafei Prabu Diradja, SH sebagai Sultan Palembang dengan gelar Sri Paduka Diradja atau Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja dan pengukuhan ini dihadiri oleh para zuriat / kerabat Kesultanan Palembang Darussalam dan beberapa utusan dari daerah (Bangka, Belitung, Komering, Lahat, Musi Banyuasin Dll).¹⁰⁴ Sejak pengukuhan Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja sebagai Sultan Palembang Darussalam, timbul reaksi/tanggapan/komentar dari beberapa orang, dan yang kurang senang bangkitnya Kesultanan Palembang Darussalam antara lain Djohan Hanafiah.

Menurut Djohan Hanafiah, sebagai budayawan Palembang “saya prihatin” bila kembali terbentuk kesultanan, lantas mana yang jadi pengikutnya, bagaimana peraturan pemerintahannya dan di mana pusat kegiatannya, sebenarnya saat ini tidak ada lagi kesultanan dan itu sudah sejak 1823 atau saat keruntuhan Kesultanan Palembang Darussalam, kini Kesultanan Palembang Darussalam hanya tinggal kenangan.¹⁰⁵

¹⁰³ SMB III Prabu Diradja, *Kesultanan Palembang Darussalam* (Palembang: Palembang Darussalam, 2009), h. 30.

¹⁰⁴ SMB III Prabu Diradja, h. 31.

¹⁰⁵ Harian Sumatera Ekspres, Selasa 11 Maret 2003.

Timbulnya Sultan Palembang Darussalam ini dikhawatirkan oleh beberapa orang yang merasa tokoh masyarakat, tokoh adat yang nantinya akan membuat mereka tidak dihargai/dianggap lagi atau mungkin juga mereka sengaja membuat perpecahan dilingkungan kerabat, zuriat Sultan-sultan Palembang Darussalam. Hal ini dapat kita lihat timbulnya Himpunan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam (HZKPD) yang dipelopori antara lain oleh Djohan Hanfiah bin Ali Amin yang menunjuk Raden Iskandar Mahmud Badaruddin menjadi ketua umumnya HZKPD dengan diberi gelar/arahan menjadi Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin bin Rahdin Haji Muhammad Harun,¹⁰⁶ disinilah awal terjadinya konflik sekaligus penyebab terjadinya dualisme kesultanan di Kesultanan Palembang Darussalam.

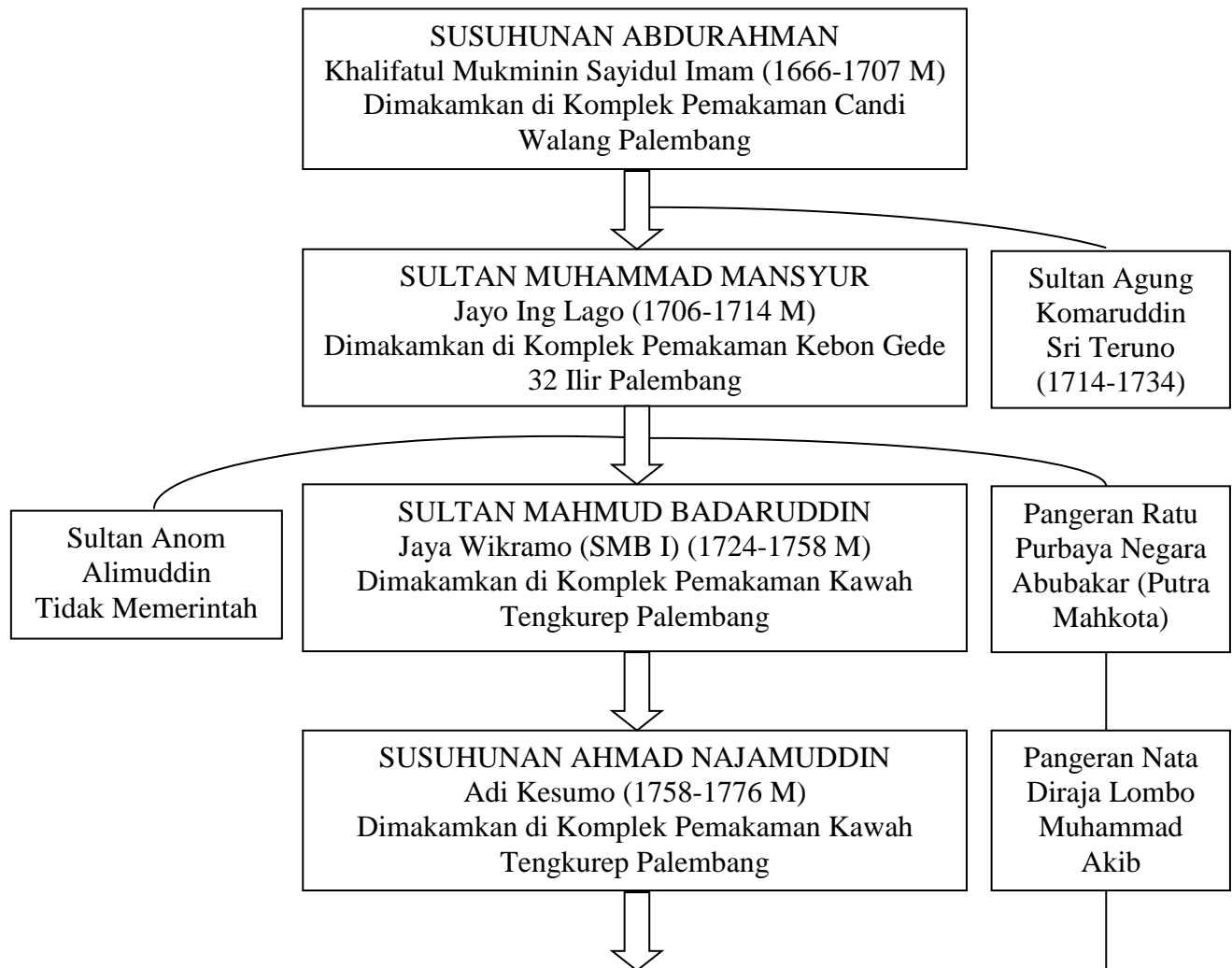
Pada acara pelantikan tersebut, banyak yang merasa terjebak/tertipu, karena acara HALAL BI HALAL diselipkan acara pelantikan, penobatan ketua umum HZKPD dengan diberi gelar sultan oleh orang yang mengaku ngaku sebagai pewaris Sultan Palembang yang asal usulnya tidak jelas dan dibuatkan orang, antara lain adalah Djohan Hanfiah, dan yang hadir pada acara tersebut antara lain Gubernur Sumatera Selatan (Ir Syahrial Usman MM) dalam acara tersebut dan pernyataan Gubernur Sumatera Selatan hanya kapasitas sebagai undangan dalam acara silaturahmi, dengan berbagai cara yang dianggapnya dapat mempengaruhi anak negeri, dengan cara membuat opini/merekayasa bahwa penobatan tersebut telah benar dan sah karena dihadiri oleh pemerintah / Gubernur Sumsel dan kalau diteliti Raden

¹⁰⁶ SMB III Prabu Diradja, *Kesultanan Palembang Darussalam* (Palembang: Palembang Darussalam, 2009), h. 2.

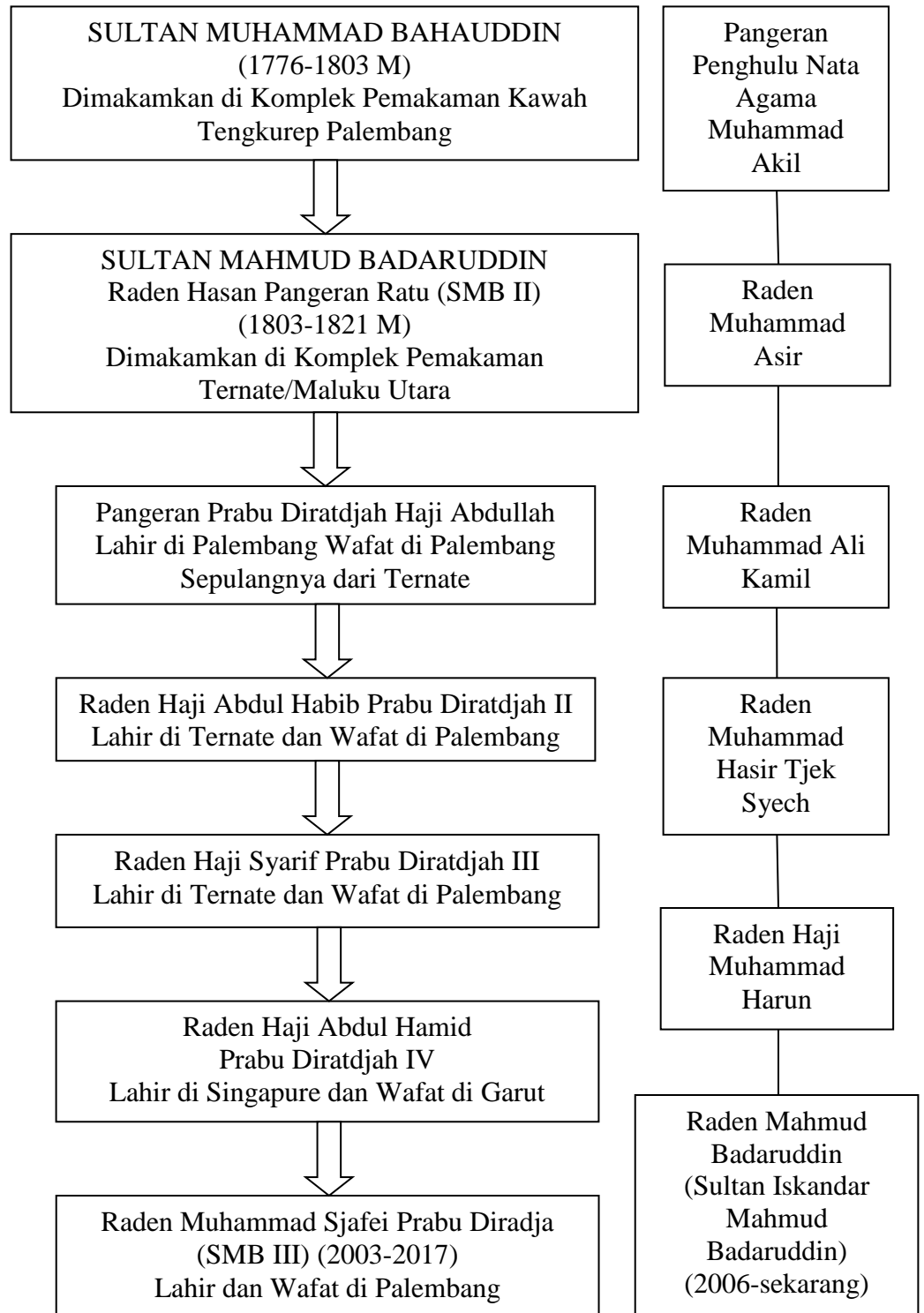
Iskandar bukan ahli waris apa lagi sebagai pewaris SMB II.¹⁰⁷ Berikut ini silsilah zuriat Kesultanan Palembang Darussalam yaitu Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja dan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin diharap dengan posisi silsilah ini, dapat membantu dalam memahami Kesultanan Palembang Darussalam.

Tabel 1

Silsilah SMB III Prabu Diradja dan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin



¹⁰⁷ SMB III Prabu Diradja, *Kesultanan Palembang Darussalam* (Palembang: Palembang Darussalam, 2009), h. 2.



Sumber: diolah dari dokumen.

Dari silsilah tersebut, maka peneliti menguraikan legalitas kekuasaan yang dimiliki oleh kedua sultan yaitu Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja bin Raden Haji Abdul Hamid Prabu Diradtjah IV dan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin bin Raden Haji Muhammad Harun melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2

Legalitas Sultan Palembang Darussalam

Legalitas	Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja	Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin
Garis geneologis	Keturunan kelima dari Sultan Mahmud Badaruddin (SMB II) dengan Ratu Ulu (Istri kedua).	Keturunan delapan Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago, tapi neneknya merupakan istri kedua dari kakeknya yang bernama Raden Muhammad Tjek Syech.
Pengakuan Oleh Ulama	Alm. K.H. Ali Umar Thoyib Alm. Ustadz Ahmad Umar Thoyib Ustadz. Abdullah Ahmad Ustadz. Nurdin Mansyur	Mengangkat sendiri Mufti atas nama Sohibul Faroji Azmatkan, dari luar Palembang.

	Ustadz. Kgs. Mustofah Azhari	
Peninggalan-peninggalan yang telah dimiliki secara turun-temurun	<p>1. Tongkat SMB II, Yang Biasa dipakai Saat Berperang.</p> <p>2. Stempel Cap SMB II.</p> <p>3. Al-Qur'an peninggalan Sultan Mahmud Badaruddin (SMB II).</p> <p>4. Istambul (kalung yang berisikan Al-Qur'an kecil), terbuat dari tembaga.</p> <p>6. Baju Kebesaran Sultan Mahmud Badaruddin (SMB II).</p> <p>7. Naskah-Naskah Kuno Yang Ditulis Sultan Mahmud Badaruddin (SMB II).</p> <p>8. Naskah-Naskah zuriat Kesultanan Palembang Darussalam.</p>	<p>1. Keris-Keris Peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam.</p> <p>2. Baju Adat Kesultanan Palembang Darussalam.</p> <p>3. Alat-Alat Perang.</p> <p>4. Al-Qur'an peninggalan Sultan Mahmud Badaruddin (SMB I).</p> <p>5. Stempel kesultanan miliki Nata Agama Muhammad Akil.</p> <p>6. Naskah-Naskah kuno tentang sejarah Kesultanan Palembang Darussalam.</p>

Tanggal penobatan sebagai Sultan Palembang Darussalam	Tanggal 03 Maret 2003, di Masjid Lawang Kidul Palembang. Oleh Majelis Kesultanan Palembang Darussalam.	Tanggal 18 November 2006, dihalaman Dalam Benteng Kuto Besak Palembang. Oleh Himpunan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam.
Masa Jabatan	Seumur hidup dan turun-menurun, berdasarkan aturan yang sebenarnya.	Dipilih kembali setelah lima tahun sekali dan murni berbentuk organisasi sosial budaya Palembang Darussalam.

Sumber: Tesis Eka Martini 2008 dan hasil penelitian penulis tahun 2017.

Berdasarkan/dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa SMB III Prabu Diradja adalah sultan yang berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam saat ini. Kemudian Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin hanya merupakan gelar biasa yang diberikan sebagai penghormatan pada ketua umum sebuah organisasi yang bergerak dibidang kebudayaan. Seorang sultan yang benar-benar mendapatkan legalitas tidak mungkin dipilih melalui musyawarah anggota organisasi dan hanya diberikan kekuasaan selama lima tahun. Sebelum dan bersifat turun-menurun (berdasarkan geneologis), dan yang terpenting adalah, adanya pengakuan dari Ulama.

C. Analisis Konflik Kekuasaan Antara Keturunan Kesultanan Palembang Darussalam Menurut Teori Konflik Ralf Dahendorf

Pengangkatan Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja sebagai Sultan Palembang Darussalam dan penobatannya mendapat tantangan pada tahun 2006. Tanggal 18 November 2006 di Palembang, himpunan zuriat Kesultanan Palembang Darussalam se-Nusantara (Sultan LSM/PAGUYUBAN HZKPD) yang didirikan tahun 2006 oleh Djohan Hanafiah¹⁰⁸ menobatkan satu sultan baru yaitu R. Mahmud Badaruddin terpilih sebagai sultan dengan gelar Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin dan penobatan dilaksanakan di halaman dalam Benteng Kuto Besak Palembang. Penobatan terhadap Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin diakui oleh Djohan Hanafiah merupakan amanat dari himpunan zuriat Kesultanan Palembang Darussalam se-Nusantara, khususnya zuriat Sultan Ahmad Najamuddin III dan IV.

Menurut Djohan, penobatan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin murni organisasi sosial kebudayaan yang bertujuan untuk menyelamatkan warisan Kesultanan Palembang Darussalam, seperti: makam-makam, pakaian dan adat istiadat Kesultanan Palembang Darussalam. Sultan pada zaman sekarang berbeda dengan sultan zaman dahulu yang memiliki legitimasi, rakyat, undang-undang dan sistem pemerintahan. Sultan disini hanya berfungsi sebagai wadah orang yang ingin melestarikan kebudayaan.¹⁰⁹

¹⁰⁸ SMB III Prabu Diradja, *Kesultanan Palembang Darussalam* (Palembang: Palembang Darussalam, 2009), h. 30-31.

¹⁰⁹ Eka Martini. Dualisme Kepemimpinan Kesultanan Palembang Darussalam, *Tesis* (Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang, 2008), h. 137.

Dahrendorf mengungkapkan “Bilamana kelompok-kelompok kepentingan bertemu dalam asosiasi dan dalam beberapa pertikaian, maka semua energi yang mereka gunakan akan disatukan dan sebuah konflik kepentingan yang keras akan lahir”¹¹⁰ Selanjutnya Dahrendorf menjelaskan hubungan antara konflik dan perubahan. Menurutnya, konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Dia mengatakan bahwa sekali kelompok-kelompok yang bertentangan muncul, maka mereka akan terlibat dalam tindakan-tindakan yang terarah kepada perubahan di dalam struktur sosial. Jika konflik itu adalah intensif, maka perubahan akan bersifat radikal. Jika konflik itu diwujudkan dalam bentuk kekerasan, maka perubahan struktural akan terjadi dengan tiba-tiba.¹¹¹ Disinilah letak konflik yang dapat menimbulkan/menciptakan perubahan.

Kekuasaan SMB III Prabu Diradja dapat dilihat dari adanya pengakuan dari para Ulama Palembang. Pengangkatan/penobatan R.M.S Prabu Diradja sebagai sultan Palembang Darussalam, menurut Ustadz Ahmad Umar Thoyib (alm) telah syah berdasarkan penelusuran zuriatnya yang masih keturunan langsung SMB II dan atas kepemilikan beberapa benda pustaka peninggalan SMB II. Selain itu, R.M.S Prabu Diradja adalah pendiri dan ketua Yayasan Kesultanan Palembang Darussalam serta dikenal oleh kesultanan se-Nusantara.¹¹²

¹¹⁰ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 137-138.

¹¹¹ Bernard Raho, SVD, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), h. 80.

¹¹² SMB III Prabu Diradja, *Kesultanan Palembang Darussalam* (Palembang: Palembang Darussalam, 2009), h. 30-31.

Kekuasaan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin kekuasaannya didasarkan kepada kelompok orang yang menamakan Himpunan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam, yang salah satu pelopornya yaitu H. Djohan Hanafiah Ali Amin membentuk dewan kesultanan/dewan adat Kesultanan Palembang dengan alasan untuk menjaga dan mengawasi perkembangan adat istiadat, maka dinobatkanlah Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin sebagai ketua umum Himpunan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam yang nantinya ketua HZKPD ini akan dipilih kembali dalam lima tahun sekali,¹¹³ tetapi dalam faktanya Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin masih memerintah sampai dengan sekarang. Disinilah menurut Dahrendorf bahwa masyarakat itu bersisi ganda memiliki sisi konflik dan kerjasama.

Menurut Dahrendorf, Teori konflik bertujuan mengatasi watak yang secara dominan bersifat arbitrer (melerai) dari peristiwa-peristiwa sejarah yang tidak dapat dijelaskan, dengan menurunkan peristiwa-peristiwa tersebut dari elemen-elemen struktur sosial. Dengan kata lain, menjelaskan proses tertentu dengan penyajian yang bersifat ramalan. Teori konflik adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dimana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya. Dahrendorf menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama (kemudian dia menyempurnakan posisi ini dengan menyatakan bahwa segala sesuatu

¹¹³ SMB III Prabu Diradja, *Kesultanan Palembang Darussalam* (Palembang: Palembang Darussalam, 2009), h. 41.

yang dapat dianalisa dengan fungsionalisme struktural dapat pula dianalisa dengan teori konflik dengan lebih baik).¹¹⁴

Dualisme kepemimpinan yang terjadi di Kesultanan Palembang Darussalam saat ini, bukan yang pertama kali. Catatan sejarah memperlihatkan pada masa kejayaan dahulu, rakyat Kesultanan Palembang Darussalam beberapa kali mengalami peristiwa kepemimpinan. Hal itu terjadi, karena adanya campur tangan bangsa Kolonial dalam kehidupan ekonomi, politik dan pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam. Hingga akhirnya, Belanda memutuskan untuk menghapuskan keberadaan Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian, menghancurkan hampir semua bangunan peninggalan kesultanan yang merupakan bukti kemegahan dan kejayaannya. Berbeda dengan dualisme kepemimpinan zaman dahulu, di era globalisasi ini dualisme kepemimpinan sering dihubungkan dengan kehidupan politik dan pemerintahan pada masa sekarang.¹¹⁵ Menurut Kemas Ari Pandji terjadinya dualisme kepemimpinan ini mungkin karna ada sekelompok orang / masyarakat yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu, saya melihat adanya kepentingan-kepentingan politik, adanya kepentingan-kepentingan pribadi, sehingga mengarah kepada yang bersangkutan.¹¹⁶

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-

¹¹⁴ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 129-130.

¹¹⁵ Eka Martini. *Dualisme Kepemimpinsn Kesultanan Palembang Darussalam*, Tesis (Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang, 2008), h. 165

¹¹⁶ Wawancara Pribadi Kemas Ari Pandji, Palembang, 30 Oktober 2017.

sumber kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan (power) yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidakmerataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan aset sosialnya relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian aset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya.¹¹⁷

Pengukuhan Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Prabu Diradja, S.H pada tanggal 03 Maret 2003 dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja¹¹⁸ dan pengangkatan yang terjadi pada tanggal 18 November 2006 yaitu Ir. H. Raden Mahmud Badaruddin dengan gelar Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin¹¹⁹ membuat Kesultanan Palembang hidup kembali, di samping itu setelah terjadinya dualisme kesultanan tentunya membuat masyarakat terpengaruh, karena mereka kebingungan yang mana yang harus kita ikuti/yang mana yang harus kita panuti. Jadi di satu sisi itu merupakan dampak negatif dari terjadinya dualisme itu.¹²⁰ Jadi jelas, pengangkatan Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja dan Ir. H. Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin merupakan kepentingan pribadi/sekelompok orang dari orang-orang yang

¹¹⁷ Setiadi Elly M dan Kolip Usman, *Penghantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 360.

¹¹⁸ Data diperoleh dari, keraton Kesultanan Palembang Darussalam SMB III Prabu Diradja. Palembang, 19 September 2017.

¹¹⁹ Data diperoleh dari, keraton Kesultanan Palembang Darussalam Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Palembang, 02 juni 2017.

¹²⁰ Wawancara Pribadi Kemas Ari Pandji, Palembang, 30 Oktober 2017.

mempunyai kepentingan, di mana kepentingan tersebut bisa bersifat negatif dan bisa bersifat positif, positifnya terjadinya dualisme kesultanan ini untuk kemajuan Kota Palembang itu sendiri.

Dahrendorf melihat proses konflik itu dari segi intensitas dan sarana yang digunakan dalam konflik. Intensitas diartikan sebagai tingkat keterlibatan kontestan dalam artian waktu, tenaga, dana, dan pikiran, sedangkan kekerasan (*violence*) diartikan sebagai sarana yang digunakan oleh para kontestan konflik dalam memperjuangkan kepentingan mereka, apakah menggunakan sarana kekerasan fisik ataukah tidak. Dahrendorf berpendapat bahwa konflik tidak dapat diselesaikan sebab menurutnya konflik bersifat dialektik. Bagi Dahrendorf konflik itu akan terus-menerus ada selama kepentingannya belum tercapai. Sementara itu, sesuatu yang dipertahankan itu tentu beragam, bukan hanya keselamatan hidupnya sendiri tetapi juga mempertahankan wilayah daerah tempat dia hidup, kekayaan, keluarganya, status, kekuasaannya dan harga dirinya.¹²¹

Di sini terlihat setelah Kesultanan Palembang mempunyai dualisme kesultanan, konflik terus berlanjut sampai saat ini di mana konflik lebih bersifat perang dingin. Ir. H. Raden Iskandar Mahmud Badaruddin mempertanyakan pernyataan Sultan Prabu Diradja menerima wangsit, dan menurutnya Sultan Prabu Diradja adalah sultan wangsit.¹²² Di lain pihak ada yang membela pernyataan Sultan Sjafei Prabu Diradja bahwasanya apa salahnya jika seseorang itu menyatakan menerima wangsit, karena

¹²¹ Setiadi Elly M dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), h. 73-75.

¹²² Wawancara Pribadi dengan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, Palembang, 02 Juni 2017.

wangsit itu merupakan suatu petunjuk.¹²³ Pengertian wangsit di sini seolah-olah pengukuhan SMB III Prabu Diradja tanpa melalui proses dan menunjuk diri sendiri menjadi Sultan Palembang Darussalam, padahal pengukuhan SMB III Prabu Diradja melalui proses seminar, musyawarah dan seterusnya (baca upaya kebangkitan Kesultanan Palembang Darussalam di atas).

Wangsit disini adalah pengertian petunjuk yang datangnya dari Allah SWT, karena tidak semua orang dapat menterjemahkannya. Untuk mencari kebenaran asal usul yang menyebabkan timbulnya perpecahan anak Negeri Palembang Darussalam dan timbullah sekelompok anak Negeri Palembang Darussalam yang menamakan kelompok team 17 (tujuh belas) yang terdiri dari lapisan anak negeri termasuk pemerintah daerah Palembang. Team 17 ini mencari fakta yang ada pada SMB III Prabu Diradja dan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Beberapa kali Raden Iskandar Mahmud Badaruddin dihubungi untuk diadakannya penelitian, akan tetapi ia selalu mengelak untuk diteliti dan bahkan timbul di munculkannya kelompok baru yaitu Lembaga Studi Kebudayaan Palembang dan dengan suratnya No. 07 / mata / I / 207 tanggal 19 Januari 2007 tentang analisa polimik Sultan Palembang ketua Taufik Wijaya dan sekretaris Muhammad Arfan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan yang isinya banyak yang ngawur dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya untuk membentuk opini.¹²⁴

¹²³ Wawancara Pribadi dengan Pangeran Nato Rasyid, Palembang, 19 September 2017.

¹²⁴ SMB III Prabu Diradja, *Kesultanan Palembang Darussalam* (Palembang: Palembang Darussalam, 2009), h. 38.

Disinilah penulis menilai ada hubungan yang tidak harmonis diantara zuriat Kesultanan Palembang Darussalam. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin yang mengatakan Sultan Prabu Diradja adalah sultan wangsit,¹²⁵ dan di dalam tulisan Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja wangsit disini seolah-olah pengukuhannya berdasarkan wangsit padahal pengukuhan Sultan Prabu Diradja melalui proses musyawah yang panjang, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini yang merusak adab, adat istiadat, budaya dan mengadu domba anak Negeri Palembang Darussalam¹²⁶ antara lain Djohan Hanafiah bin M Ali Amin (yang dapat kita pelajari dari sejak bangkitnya Kesultanan Palembang Darussalam tahun 2003) yang merasa tidak puas terhadap timbulnya Kesultanan Palembang Darussalam di bawah Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja, karena dia sendiri tidak memenuhi persyaratan menjadi Sultan Palembang Darussalam (baca upaya kebangkitan Kesultanan Palembang Darussalam di atas).

Menurut Kemas Ari Pandji *“pengangkatan sultan di Kesultanan Palembang Darussalam tidak lain untuk kemajuan Kota Palembang, di samping itu institusinya sekarang ini walaupun dia ada, dia dianggap tidak bisa berpolitik tetapi ia lebih mengarah kepada menjaga kebudayaan, menjaga sejarah, dan aset-aset sejarah. Jadi semacam gerakan kultural, karena sebenarnya sultan ini hanyalah sebuah simbolis*

¹²⁵ Wawancara Pribadi dengan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, Palembang, 02 Juni 2017.

¹²⁶ SMB III Prabu Diradja, *Kesultanan Palembang Darussalam* (Palembang: Palembang Darussalam, 2009), h. 38.

*mewakili setiap daerah sama seperti kesultanan lainnya.*¹²⁷ Selain itu, menurut Nyimas Umi Kalsum *“tidak apa-apa jika Kesultanan Palembang Darussalam memiliki dua sultan dan jalani saja menurut versinya masing-masing”* karena menurutnya: *“keberadaan kesultanan ini lebih mengarah kepada menjaga aspek kebudayaan bukan kepada aspek politik, dan keberadaan kesultanan ini untuk kemajuan Kota Palembang.”*¹²⁸ Jadi kesultanan ini harus bersatu untuk kemajuan Kota Palembang yang lebih baik lagi.

¹²⁷ Wawancara Pribadi dengan tokoh adat Palembang Kemas Ari Pandji, Palembang, 29 Juli 2017.

¹²⁸ Wawancara Pribadi Nyimas Umi Kalsum, Palembang, 26 September 2017.



UIN

**RADEN FATAH
PALEMBANG**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesultanan Palembang Darussalam merupakan salah satu kesultanan yang berada di Nusantara yang letaknya berada di Provinsi Sumatera Selatan lebih tepatnya di Kota Palembang. Kesultanan Palembang Darussalam saat ini hampir di lupakan semua orang khususnya masyarakat Kota Palembang dan sangat sedikit sekali dibuat dalam tulisan-tulisan sejarah nasional. Kebesaran Kesultanan Palembang Darussalam dimasa silam membuat beberapa pihak berupaya untuk membangkitkan kembali Kesultanan Palembang Darussalam. Tokoh-tokoh yang memperebutkan kekuasaan kesultanan di Kesultanan Palembang Darussalam ini diperebutkan oleh:

Tokoh pertama yaitu Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Prabu Diradja, S. H bin Raden Haji Abdul Hamid Prabu Diradja IV bertempat di Masjid Lawang Kidul Palembang, melalui hasil musyawarah adat sesepuh dan tetuo adat Palembang Darussalam di mana beberapa orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh masyarakat penting (antara lain: Djohan Hanafiah, RA Rahman Zeth, RM Mansyur Yan, RM Sjafei Prabu Diradja) dan hasil penelitian pada tanggal 02 Maret 2003 M yang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut adalah Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Prabu Diradja, S.H bin Raden Haji Abdul Hamid Prabu Diradja IV dinobatkan sebagai sultan di Kesultanan Palembang Darussalam dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja.

Tokoh kedua yaitu Ir. H Raden Mahmud Badaruddin bin Raden Haji Muhammad Harun bertempat di Benteng Kuto Besak Kuto Anyar Palembang Darussalam, kelompok orang yang menamakan Himpunan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam (HZKPD), yang salah satu pelopornya adalah Djohan Hanafiah Ali Amin membentuk dewan kesultanan/dewan adat Kesultanan Palembang Darussalam dengan alasan untuk menjaga dan mengawasi perkembangan adat istiadat. Mereka mengangkat dan menobatkan ketua umum Himpunan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam (HZKPD) yaitu Raden Mahmud Badaruddin bin Raden Haji Muhammad Harun dengan gelar Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin.

Terjadinya dualisme kesultanan ini dikarenakan hampir siseluruh kerajaan-kerajaan nusantara ini nasibnya sama dengan Kesultanan Palembang Darussalam, hanya beberapa kesultanan saja yang sekarang ini masih eksis dan masih bertahan sampai saat ini. Timbul kesadaran dari kaum-kaum elit tradisional ini untuk membangkitkan kembali Kesultanan Palembang Darussalam karena semangatnya untuk menjaga kearifan lokal yang ada di nusantara ini. Selain itu, terjadinya dualisme kesultanan di Kesultanan Palembang Darussalam dapat diketahui bahwa tidak ada aturan dan hukum yang baku tentang proses penggantian atau pewaris tahta pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Hal inilah yang mendasari atau memacu terjadinya konflik dan dualisme kesultanan di Kesultanan Palembang Darussalam di mana semua tokoh merasa berhak sebagai penerus sultan di Kesultanan Palembang Darussalam.

B. Saran-saran

Beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis mengenai hasil penelitian ini:

1. Bagi akademis diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai informasi pendukung menambahkan penjelasan dalam bidang Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya Ilmu Politik, hal ini berkenaan dengan konsep konflik dan juga kekuasaan dalam sejarah kesultanan Melayu.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan semua orang yang membacanya baik dari kalangan masyarakat umum maupun mahasiswa khususnya mahasiswa Ilmu Politik.
3. Diharapkan ada mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk menambah dan memperbaiki hasil penelitian yang sudah ada ini.
4. Bagi Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diradja dan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin diharapkan dapat melestarikan aset-aset sejarah Palembang, menjalankan program kerja dan saling bekerja sama dalam membangun Kota Palembang yang lebih baik.
5. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Pemerintah Kota Palembang juga harus memberikan dukungan pada semua kegiatan yang dilaksanakan Kesultanan Palembang Darussalam dan untuk melestarikan aset sejarah khususnya mengenai pelestarian peninggalan-peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Susi Herti Afriani. Dkk., *Sistem Kekebabatan Marga dan Pengaruhnya dalam Proses Pembentukan Struktur Politik di Sumatera Selatan* (Palembang: NoerFikri Offset bekerja sama dengan Fakultas Adab dan Humaniorah UIN Raden Fatah, 2016)
- Akib, R.H.M. *Sejarah Palembang* (Palembang: Pidato Dies. APDN, 1969)
- Andy, Kick. *Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin* (Video), 26 Januari 2015
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; suatu pendekatan praktik* (Jakarta: rineka cipta, 2002)
- Budiarjo, Miriam. Dkk., *Jurnal Ilmu Politik 4* (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Penerbit PT Gramedia, 1989)
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Perss, 2012)
- Darmawijaya. *Kesultanan Islam Nusantara* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2010)
- Diradja, SMB III Prabu. *Kesultanan Palembang Darussalam* (Palembang: Palembang Darussalam, 2009)
- Hanafiah, Djohan. *Perang Palembang Melawan V.O.C* (Palembang: Karyasari, 1996)
- Harian Sumatera Ekspres, Selasa 11 Maret 2003
- Huda, Nor. *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

- Ilham, Muhammad. “Diplomasi Politik Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda Berdasarkan Surat-Surat Melayu Abad ke 19”, *Tesis* (Program Pascasarjan UIN Raden Fatah Palembang, 2015)
- Indriastuti, Kristantina. Dkk., *Peradaban Masa Lalu Sumatera Selatan* (Palembang: Balai Arkeologi Sumatera Selatan, 2016)
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Bandung: CV. Transito. 1982)
- Laporan Kinerja Pemerintahan Kota Palembang Tahun 2014, (Palembang: Pemerintahan Kota Palembang)
- Maran, Rafael Raga. *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001)
- Martini, Eka. Dualisme Kepemimpinan Kesultanan Palembang Darussalam, *Tesis* (Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang, 2008)
- Nasiwan, *Teori-Teori Politik* (Cetakan I: UNY Press bekerjasama dengan FISE UNY, Yogyakarta, 2007)
- Palembang Ekspres “Prabu Diradja “Sultan Mahmud Badaruddin III” blak-blakan soal Kesultanan Palembang Darussalam – Saya Menerima Wangsit,” Palembang, 11 Maret 2003
- Peter, Calvert. *Proses Suksesi Politik* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1995)
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003)

- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Raho, Bernar. *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007)
- Ravico. *Konflik Elit Politik Di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821*, Tesis (Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang, 2013)
- Rudyansjah, Tony. *Kekuasaan, Sejarah, & Tindakan (Sebuah Kajian Tentang Lanskap Budaya)*, 2009. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada
- Setiadi, Elly M., dan Usman, Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Setiadi, Elly M., dan Usman, Kolip. *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Syawaludin, Muhammad. “*Analisis Sosiologis terhadap Sistem Pergantian Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam*”, Jurnal diakses pada tanggal 15 Desember 2016, pkl: 15:23 dari <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/427/378>

Syukri, Ahmad. *Peran Religio Politik Sayyid Palembang di Semenanjung Melayu Abad 18 dan 19 M* (Yogyakarta: LP2M UIN Raden Fatah Palembang Bekerjasam dengan Idea Press Yogyakarta, 2015)

Tim Penyusun, *Pedoman penulisan Skripsi Fakultas Adab* (Palembang: Fakultas Adab, 2013)

Varma, S.P. *Teori Politik Modern* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001)

Wawancara:

Wawancara Pribadi Nyimas Umi Kalsum, Palembang, 26 September 2017

Wawancara Pribadi dengan Pangeran Nato Rasyid, Palembang, 19 September 2017

Wawancara Pribadi dengan R.M Fauwaz Diradja. Palembang, 19 September 2017

Wawancara Pribadi dengan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, Palembang, 02 juni 2017

Wawancara Pribadi dengan Ustad Andi Syarifuddin, Palembang, 28 Mei 2017

Wawancara Pribadi dengan tokoh adat Palembang Kemas Ari Pandji, Palembang, 29 Juli 2017

DRAF WAWANCARA

SULTAN PALEMBANG DARUSSALAM

1. Siapa nama lengkap dan nama panggilan bapak?
2. Di mana tempat dan tanggal lahir bapak?
3. Di mana riwayat pendidikan bapak?
4. Apa pekerjaan dan aktivitas bapak?
5. Pada tahun berapa bapak dilantik sebagai penerus Kesultanan Palembang Darussalam?
6. Di mana bapak dilantik sebagai penerus Kesultanan Palembang Darussalam?
7. Apakah ada kendala/hambatan pada saat proses pelantikan bapak?
8. Siapa saja yang melantik bapak?
9. Secara garis keturunan, bapak keturunan kesultanan yang keberapa?
10. Apakah ada peninggalan-peninggaan dari kesultanan yang terdahulu? Jika ada, apa peninggalannya?
11. Bagaimana hubungan bapak dengan masyarakat Kota Palembang?
12. Bagaimana cara bapak membangun komunikasi kepada masyarakat Kota Palembang?
13. Kebudayaan apa yang sekarang sudah dilupakan oleh masyarakat Kota Palembang?
14. Apa bentuk kontribusi bapak sebagai pembesar di Kota Palembang?

15. Apakah ada kerja sama antara Pemerintah Kota Palembang dengan Kesultanan Palembang? Jika ada, tolong bapak sebutkan.
16. Bagaimana pendapat bapak tentang pembangunan yang dilakukan pemerintah sekarang?
17. Mengapa Kesultanan Palembang Darussalam harus dibangkitkan kembali? Dan apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan Kesultanan Palembang harus dibangkitkan kembali? Padahal Kesultanan Palembang Darussalam resmi dihapuskan oleh kolonial Belanda.
18. Menurut bapak, pada tahun berapa masa keemasan Kesultanan Palembang Darussalam? khususnya yang sekarang.
19. Apakah ada kerja sama diplomatik dengan negara tetangga? Jika ada tolong bapak sebutkan dan bentuk kerja sama seperti apa yang bapak lakukan.
20. Apakah bapak mendapatkan bayaran (gaji) sebagai pembesar di kota Palembang? Jika iya, siapa yang membayar bapak?

DRAF WAWANCARA

TOKOH-TOKOH ADAT KOTA PALEMBANG

1. Siapa nama lengkap dan nama panggilan bapak?
2. Di mana tempat dan tanggal lahir bapak?
3. Pada Tahun berapa bapak Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Prabu Diradja, S.H dan Ir. H. Raden Mahmud Badaruddin dilantik sebagai penerus Kesultanan Palembang Darussalam?
4. Di mana bapak Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Prabu Diradja, S.H dan Ir. H. Raden Mahmud Badaruddin dilantik sebagai penerus Kesultanan Palembang Darussalam?
5. Apakah ada kendala/hambatan pada saat proses pelantikannya?
6. Siapa saja yang melantiknya?
7. Bagaimana cara bapak Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Prabu Diradja, S.H dan Ir. H. Raden Mahmud Badaruddin membangun komunikasi kepada masyarakat Kota Palembang?
8. Apakah ada kerja sama antara Pemerintah Kota Palembang dengan Kesultanan Palembang Darussalam? Jika ada, tolong bapak sebutkan.
9. Bagaimana tanggapan bapak tentang kesultanan yang sekarang?
10. Menurut bapak, apakah ada konflik diantara keturunan kesultanan sehingga mereka pantas dinobatkan sebagai penerus Kesultanan Palembang Darussalam? Jika ada, jelaskan mengapa.

11. Bagaimana pendapat bapak tentang pemerintah sekarang dengan kesultanan yang sekarang?
12. Apakah ada pengaruh bagi masyarakat Kota Palembang setelah dilantiknya penerus baru Kesultanan Palembang Darussalam?
13. Sejauh ini, masyarakat tau bahwa Kesultanan Palembang Darussalam dihidupkan/dibangkitkan kembali. Bagaimana tanggapan bapak tentang masyarakat yang setuju ataupun yang tidak setuju?
14. Mengapa Kesultanan Palembang Darussalam harus dibangkitkan kembali? dan apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan Kesultanan Palembang Darussalam harus dibangkitkan kembali? padahal Kesultanan Palembang resmi dihapuskan oleh kolonial Belanda.
15. Bagaimana menurut bapak, tentang bangkitnya kembali kesultanan ini?
16. Apakah ada atau tidak kerja sama diplomatik dengan negara tetangga yang dilakukan oleh bapak Drs. Raden H. Muhammad Sjafei Prabu Diradja, S.H dan Ir. H. Raden Mahmud Badaruddin?
17. Bentuk kerja sama seperti apa yang dilakukannya?
18. Apa harapan bapak untuk Kesultanan Palembang Darussalam?

LAMPIRAN



(Wawancara di keraton dan kediaman Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin)



(Wawancara Sultan Mahmud Badaruddin IV Jaya Wikrama)



(Wawancara Pangeran Nato Rasyid)



(Tokoh Adat Palembang Ustad Andi Syaripudin dan Bapak Kemas Ari Pandji)



RATUSAN warga Empat Lawang, Senin (27/4) sore ramai-ramai mengperamu pendirian Rumah Dinas (Rumah) Bupati Empat Lawang.



POM Sita 9 Ton Solar Illegal

Diduga Dibeking Oknum TNI

PALEMBANG, PE - Kasus ilegal tapping di Sumsel masih kerap menjadi lahan basah bagi oknum dalam meraup keuntungan me-

limpah. Ika sebelumnya Detasemen Intel Kodam (Dentintedam) II/Swj berhasil membongkar transaksi ilegal bahan bakar minyak (BBM)

di perairan Sungai Musi. Gilran Detasemen Polisi Militer (Dempom) Kodam II/Swj mengamankan 9 ton solar ilegal di kawasan TPA Kera-

man, Kertapati, Senin (27/4). Operasi tangkap tangan ini ber- hasil mengamankan 90 ton solar ilegal yang diangkat ke dalam tiga

bak truk yang akan dijual ke Kapal Motor OSIS dan Karya Pacific. Di- duga, penjual BBM ilegal ini dibeking oleh oknum TNI.

Tingkatkan Perekonomian dan Kebudayaan Melayu

Kesultanan Palembang Darusalam gandeng Malaysia dan Belitung Timur

PALEMBANG, PE - Untuk meningkatkan pe- rekonomian dan budaya melayu di wilayah Su- matera bagian selatan (Sumbagwel), Kesultanan Palembang Darusalam terus membangun kerja- sama yang baik dengan Malaysia dalam bidang perekonomian dan budaya melayu.

Tidak hanya Malaysia, Kesultanan Palembang Darusalam juga siap menggandeng Belitung Timur untuk lebih memajukan perekonomian dan budaya melayu di sini.

■ Bersambung ke HAL 5



GELAR
Sultan Palembang Darusalam, SMB II Prabu Diradja Al-Hajj (kanan) resmi menganugerahkan gelar Derjah Paduka Mahkota Palembang kepada Bupati Belitung Timur, Dato' Pangiran Adipati Dr Basri Tajaya Putmana, tadi malam.

Jembatan Ambruk, Truk Pupuk Nyemplung



AMBRUK
Sebagian muatan pupuk kandang jatuh ke sungai menyusul ambruknya Jembatan penghubung Desa Tanjung Gelam-Tanjung Agung saat hendak dilewati truk yang dikemudikan Lekat, Senin (27/4) siang.

INDRALAYA, PE - Tidak kuat menahan be- ban truk pengangkut pupuk dengan muatan 80 ton nomor polisi (nopol) BG 8417 AL, mem- buat jembatan penghubung Desa Tanjung Gelam-Tanjung Agung meniadak ambruk, dan membuat mobil jatuh ke sungai. Untung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Tak pelak kejadian ini menjadi tontonan warga desa tersebut. Bahkan, warga dari desa tetangga seperti Tanjung Sejar, Sakatiga, dan Lubuk Sakti berbondong-bondong untuk me- lihat jevas kejadian tersebut.

Menurut keterangan sopir truk, Lekat (29), warga Perumnas Palembang, muatannya be- rupa pupuk kotoran ayam ini dibawa dari Pa- lembang dengan tujuan Desa Tanjung Agung yang memiliki kebun belukah.

■ Bersambung ke HAL 5

Santri dan Ulama Minta RF Dibebaskan



ORASI
Masa berorasi di halaman gedung PN Lahat, menuntut pembebasan terdakwa RF yang terlibat dugaan kasus percabulan terhadap santri.



Syahrial Osman, Ks Ari Joko Sanjaya BK, Davan 044 Gajo, RH Johan Hanifah, Prof dr KH Usman Said SPOG, H Mgs Romli Sutonegara, Kgs H Romi Hanan, Rombot R/ Purn Mgs Zainal Abidin, Wawako Ternate, RH Nyayu Atika Nanan

Penobatan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin



Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin membacakan sambutan.

PRINDEKLARASIAN serta penobatan Ketua Umum Pimpinan Zariat Kesultanan Palembang Darussalam, Minggu (19/11), di Keraton Benteng Kuto Besak benar-benar menarik minat masyarakat. Sekitar 7.000 masyarakat kota Palembang yang terus berdatangan memadati halaman dalam benteng

Sumed, Ketua dan Pengurus Zariat Kesultanan Palembang Darussalam se-Nusantara, Ketua Lembaga Adat Majelis Farkar dan Badayawan Zariat Kesultanan Palembang Darussalam, RH Johan Hanifah, Dewan Penasihat Pimpinan Zariat Kesultanan Palembang Darussalam, H Mgs Romli Sutonegara, Ketua Himpunan Kombes Pul Purn Mgs Zainal Abidin, Ketua Kerakutan Kolaborasi Palembang (DKP) Kgs H Romi Hanan serta Paguyuban yang bergabung dalam Badan Korpriwasi Sosial dan Budaya Paguyuban Indonesia Sumatera Selatan, Ragat Adat Zariat Kesultanan Palembang Darussalam se-Nusantara, Sabtu (18/11), menyatakan perlu peningkatan wabah Zariat Kesultanan Palembang Darussalam dalam bentuk Kesultanan yang bernuansa kepada kebudayaan adat dan istiadat. Untuk itu perlu dibentuk Dewan Kesultanan atau Dewan Adat untuk menjaga dan mengamalkan perkembangan adat istiadat. Hasil keputusan rapat yang memakan waktu hampir delapan jam ini dipaparkan untuk mengagkat di RH Mahmud Badaruddin dengan gelar SULTAN ISKANDAR MAHAUD BADARUDDIN.

Gubernur Sumed Ir Syahril Osman yang datang langsung menyaksikan penobatan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin tersebut mengungkapkan harapan besarnya kepada Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Syahril siap membantu dan bekerjasama terhadap apa yang telah diprogramkan Zariat Kesultanan Palembang Darussalam. Sultan Iskandar Mahmud

Badaruddin sendiri menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Sumed atas perjuangannya terhadap nilai-nilai dan budaya adat istiadat Kesultanan Palembang Darussalam. Selain sendiri siap mendukung segala kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumed yang berorientasi baik dalam pembangunan sosial

maupun budaya. Atasa yang dituang dengan dua yang dipaparkan Prof dr KH Usman Said SPOG ini berlangsung sukses dan hikmah. Hal ini dilakui Ketua Panitia Halat

Bihalat serta Perlatihan, RH Nyayu Atika Nanan dengan menyatakan sangat berbesar dan gembira atas suksesnya perlatihan ini. (ADVERTORIAL)

NAMA-NAMA RAJA/SULTAN KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM YANG BERKUALA

1. Susuhunan Abdul Rahman bergelar Chohatid Mukminih Bayyidul Imam
2. Sultan Muhammad Manjaur Jaya Ing Lago
3. Sultan Agung Kurnasuddin Sa Terusi
4. Sultan Anom Alimuddin
5. Sultan Mahmud Badaruddin / Ayo Wilcano
6. Susuhunan Ahmad Najamuddin Abi Kesumo
7. Sultan Muhammad Badaruddin
8. Sultan Mahmud Badaruddin II
9. Susuhunan Husin Dhuaidin
10. Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu
11. Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom, yang merupakan Sultan terakhir dari Kesultanan Palembang Darussalam (1574-1823). Sultan ini sebelum dibuang sempat diwaj oleh Belanda dengan gelar Sultan Anom. Beliau disargikan ke Banda Lata ke Manado dan akhirnya wafat di Manado. Namun seyangnya sampai sekarang dukanya Dalam ditamakan. Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin akan menggantikan ke pemerintahan untuk melanjutkan Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom ini sebagai Pahlawan Nasional.



Gubernur Sumed Ir Syahril Osman membacakan sambutan.



Gubernur Sumed Ir Syahril Osman ucapkan selamat kepada Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin.



Pembuatan SK Keputusan Penobatan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin oleh Dewan Adat Kesultanan Palembang Darussalam se-Nusantara. Lemah Lau Purn RM Yusuf Pradumanya



Ketua Lembaga Adat Majelis Farkar dan Badayawan Zariat Kesultanan Palembang Darussalam, RH Johan Hanifah membacakan sambutan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin



Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin disambut Pengurus Zariat Kesultanan Palembang Darussalam



Pada tema undangan yang hadir di antaranya R Hanono, Ketua Himpunan Paguyuban (asing kini), Rani Sulanegara, Romi Hanan, Anwar Fandi (semua dari kiri)



Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin (kanan) dapat Gubernur Sumed Ir Syahril Osman dan Ketua Lembaga Adat Majelis Farkar dan Badayawan Zariat Kesultanan Palembang Darussalam, RH Johan Hanifah



KONGRES UMAT ISLAM INDONESIA KE VI DI YOGYAKARTA

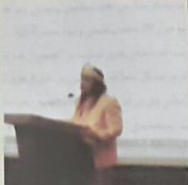


SULTAN ISKANDAR MAHMUD BADARUDDIN

Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin sebagai Ketua Umum Yayasan Raja Sultan Nusantera bersama para Perwakilan Raja, Sultan yang ada di Nusantara mendapat Undangan dalam Kongres Umat ISLAM ke VI yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 8 – 11 Februari 2015 di hotel Inna Garuda Yogyakarta. Pembukaan Kongres tersebut dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala di Keraton Yogyakarta dan di tutup oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin juga diminta menyampaikan sambutan dalam makan malam di Inna Garuda hotel Yogyakarta 8 Februari 2015, dan menjadi Narasumber dalam Kongres Umat Islam ke VI tanggal 10 Februari 2015, karena sebelum NKRI ini Para Raja, Sultan yang memegang tampuk kendali Pemerintahan secara Islam di Kerajaan, Kesultanan Islam di Nusantara (Ar15 / Adv).

- Hasil Rumusan Komisi Sosial Budaya Pada KONGRES UMAT ISLAM INDONESIA KE VI**
- Komisii Sosial Budaya menyepakati bahwa dalam rangka penguatan peran sosial budaya umat Islam Indonesia ditempuh melalui empat strategi utama yaitu :
1. Penguatan Identitas kebangsaan
 2. Pengembangan Generasi Muda
 3. Perlindungan dari Pemertadan, aliran sesat, sinkretisme, Perdukunan, WANGSIT, dan Pemikiran SPILIS (sekulerisme, pluralisme dan liberalisasi)
 4. Revitalisasi budaya Islam Melalui Kesultanan



Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin memberikan kata sambutan pada Kongres Umat Islam Indonesia ke VI di Inna Garuda Hotel



Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin bersama Presiden R.I. Bapak Joko Widodo pada penutupan Kongres Umat Islam Ke VI di Yogyakarta



Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin berbicara hangat dengan Wakil Presiden R.I. Yusuf Kala



Wakil Presiden R.I. Yusuf Kala Membuka Kongres Umat Islam ke VI di Keraton Ngayogyakarta



Sultan memberikan penghargaan YARASUTRA kepada Raja MUI Prof Dr. R. H. Din Spamsuddin



Perwakilan para Raja, Sultan Nusantara menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia ke VI



Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin menjadi Narasumber bersama Gus Sunud, Bupati Banyuwangi, Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Komarudin, Hidayat, 16 July Alayyah pada Kongres K.U.I. ke VI



Sultan dan Narasumber lainnya menerima penghargaan di Kongres Umat Islam Indonesia ke VI

Indonesia | [English](#)
[Manual](#) | [Tautan](#) | [Peta Situs](#)

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALEMBANG

[Beranda](#) | [Tentang Kami](#) | [Berita](#) | [Senarai Rencana Terbit](#) | [Publikasi](#) | [Berita Resmi Statistik](#) | [Informasi Publik](#)

Kecamatan	2014				
	Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut				
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
Ilir Barat II	69 722	992	806	25	2 877
Gandus	67 304	189	165	3	117
Seberang Ulu I	184 811	690	501	75	2 433
Kertapati	98 316	359	112	28	561
Seberang Ulu II	100 631	688	341	31	839
Pilaju	94 103	728	380	47	692
Ilir Barat I	137 109	2 220	1 555	110	6 567
Bukit Kecil	46 676	836	671	62	1 578
Ilir Timur I	60 381	4 686	5 934	106	17 229
Kemuning	84 767	2 337	1 304	17	5 042

Subjek, Subject **Keterangan** **Notes**

(*Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut,"Number of Population by religion")

Indonesia | [English](#)
[Manual](#) | [Tautan](#) | [Peta Situs](#)

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALEMBANG

[Beranda](#) | [Tentang Kami](#) | [Berita](#) | [Senarai Rencana Terbit](#) | [Publikasi](#) | [Berita Resmi Statistik](#) | [Informasi Publik](#)

Kecamatan	2014				
	Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut				
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
Bukit Kecil	46 676	836	671	62	1 578
Ilir Timur I	60 381	4 686	5 934	106	17 229
Kemuning	84 767	2 337	1 304	17	5 042
Ilir Timur II	170 086	5 257	3 811	131	11 518
Kalidoni	114 790	3 086	1 652	63	3 081
Sako	86 291	3 860	2 117	72	2 764
Sematang Borang	36 104	2 186	999	6	207
Sukarami	145 383	4 812	2 556	112	3 130
Alang-alang Lebar	88 702	2 788	945	77	4 063
Kota Palembang	1 585 176	35 714	23 849	965	62 698

Subjek, Subject **Keterangan** **Notes**

(*Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut,"Number of Population by religion")

(Data Agama dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang)